

**ANALISIS TINGKAT *FRAUD* DANA DESA TERHADAP
EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Desa Bana, Kecamatan Bontocani)**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Magister



Oleh :

T A H I R
4618104022

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Analisis Tingkat *Fraud* Dana Desa terhadap Efektivitas PEMBERDAYAAN Masyarakat (Studi Kasus Desa Bana, Kecamatan Bontocani)
2. Nama : Tahir
3. NIM : 4618104022
4. Program Studi : Manajemen

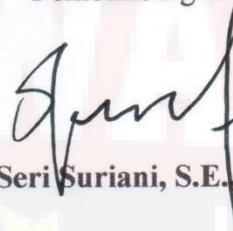
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Thamrin Abduh, S.E., M.Si.

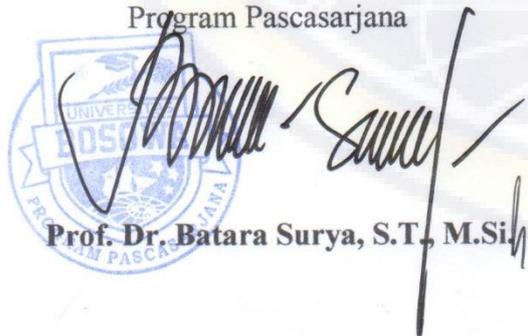
Pembimbing II



Dr. Seri Suriani, S.E., M.Si.

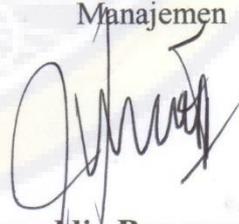
Mengetahui,

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.

Ketua Program Studi
Manajemen



Dr. Hasanuddin Remmang, S.E., M.Si.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2020

Tesis atas nama : Tahir

NIM : 4618104022

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Megister pada Program Studi Manajemen.

Ketua : Dr. Thamrin Abduh, S.E., M.Si. (.....)
(Pembimbing I)

Sekretaris: Dr. Seri Suriani, S.E., M.Si. (.....)
(Pembimbing II)

Penguji I : Dr. Muhlis Ruslan, S.E., M.Si. (.....)

Penguji II: Dr. Herminawaty Ab. S.E., M.M. (.....)

Makassar,

Direktur,



Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 23 September 2020

Mahasiswa



TAHIR

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan ilmu yang dititipkan kepada kita semua sehingga kita mampu membaca, menulis serta menganalisa suatu permasalahan yang kita hadapai di kehidupan ini, shalawat dan salam senang tiasa kita ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam untuk Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang manjadi teladan pada kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak InsyaAllah.

Pada Tesis ini membahas tentang Anggaran Dana Desa yang dikhususkan pada pengaruh tingkat fraud dana desa terhadap efektivitas pembedayaan masyarakat, hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fraud terhadap tercapainya tujuan Pemerintah sehingga nantinya bisa menjadi masukan untuk pengelolaan Anggaran Dana Desa yang lebih efektif untuk menghindari peluang terjadinya kecurangan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian peneliti, Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya ilmiah ini maka dari itu Kami penulis senantiasa menerima kritik dan saran yang dapat membangun guna menyempurnakan hasil karya ilmiah ini dan pada umumnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

Makassar, 23 September 2020

Penulis

TAHIR

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT FRAUD DANA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Bana, Kec. Bontocani)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dan manfaat yang dirasakan masyarakat setelah adanya program dana desa serta untuk mengetahui pengaruh tingkat fraud dana desa terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat pada desa tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat cukup besar, dimulai dari perencanaan program kerja sampai dengan pelaksanaan program kerja dilaksanakan sesuai dengan aturan penggunaan dana desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Masyarakat setiap Dusun. Adapun manfaat yang dirasakan masyarakat cukup banyak karena semua Program Kerja yang dilaksanakan berdasarkan dengan permintaan Masyarakat setempat. Sedangkan hasil dari analisis tingkat fraud terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat ditemukan tidak signifikan. Meskipun keterlibatan masyarakat cukup besar dan manfaat yang dirasakan masyarakat cukup banyak sehingga mengurangi terjadinya fraud namun hal itu tidak berpengaruh terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Keterlibatan, Manfaat, Fraud, Efektivitas, Masyarakat, Desa

ABSTRACT

ANALYSIS OF VILLAGE FUND FRAUD LEVELS ON THE EFFECTIVENESS OF COMMUNITY EMPOWERMENT (Case Studi Village Bana, Subdistrict Bontocani)

This study aims to determine community involvement and the benefits felt by the community after the existence of the village fund program and to determine the effect of the level of village fund fraud on the effectiveness of community empowerment in the village, the research methods used are qualitative and quantitative methods using quantitative data analysis techniques. This research shows that community involvement is quite large, starting from work program planning to implementation of work programs carried out in accordance with the rules for the use of village funds by involving the Village Consultative Body, Community Figures and Community Representatives in each hamlet. There are quite a lot of benefits felt by the community because all Work Programs are implemented based on the request of the local community. Meanwhile, the results of the analysis of the level of fraud on the effectiveness of community empowerment were found to be insignificant. Even though community involvement is quite large and the benefits felt by the community are quite large, reducing the occurrence of fraud, it does not affect the effectiveness of community empowerment.

Keywords: Involvement, Benefits, Fraud, Effectiveness, Community, Village

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang.....	8
1.2. Rumusan Masalah.....	16
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Teori Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	20
2.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	22
2.3. Pengertian Efektivitas	25
2.4. Dana Desa	26

2.5.	Penelitian Terdahulu	28
2.6.	Kerangka Berfikir	31
2.7.	Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1.	Jenis Penelitian	33
3.2.	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	33
3.3.	Populasi dan Sample	34
3.4.	Variabel Penelitian.....	35
3.5.	Instrumen Penelitian	36
3.6.	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.7.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.8.	Teknik Analisis Data	40
3.9.	Rencana Validitas dan Reabilitas Data	43
3.10.	Definisi Operasional	44
BAB IV PEMBAHASAN		46
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
4.2.	Deskripsi Responden	53
4.3.	Hasil Penelitian	54
4.4.	Pembahasan	55
BAB V PENUTUP		88
5.1.	Kesimpulan	88
5.2.	Saran	89

DAFTAR PUSTAKA..... 90

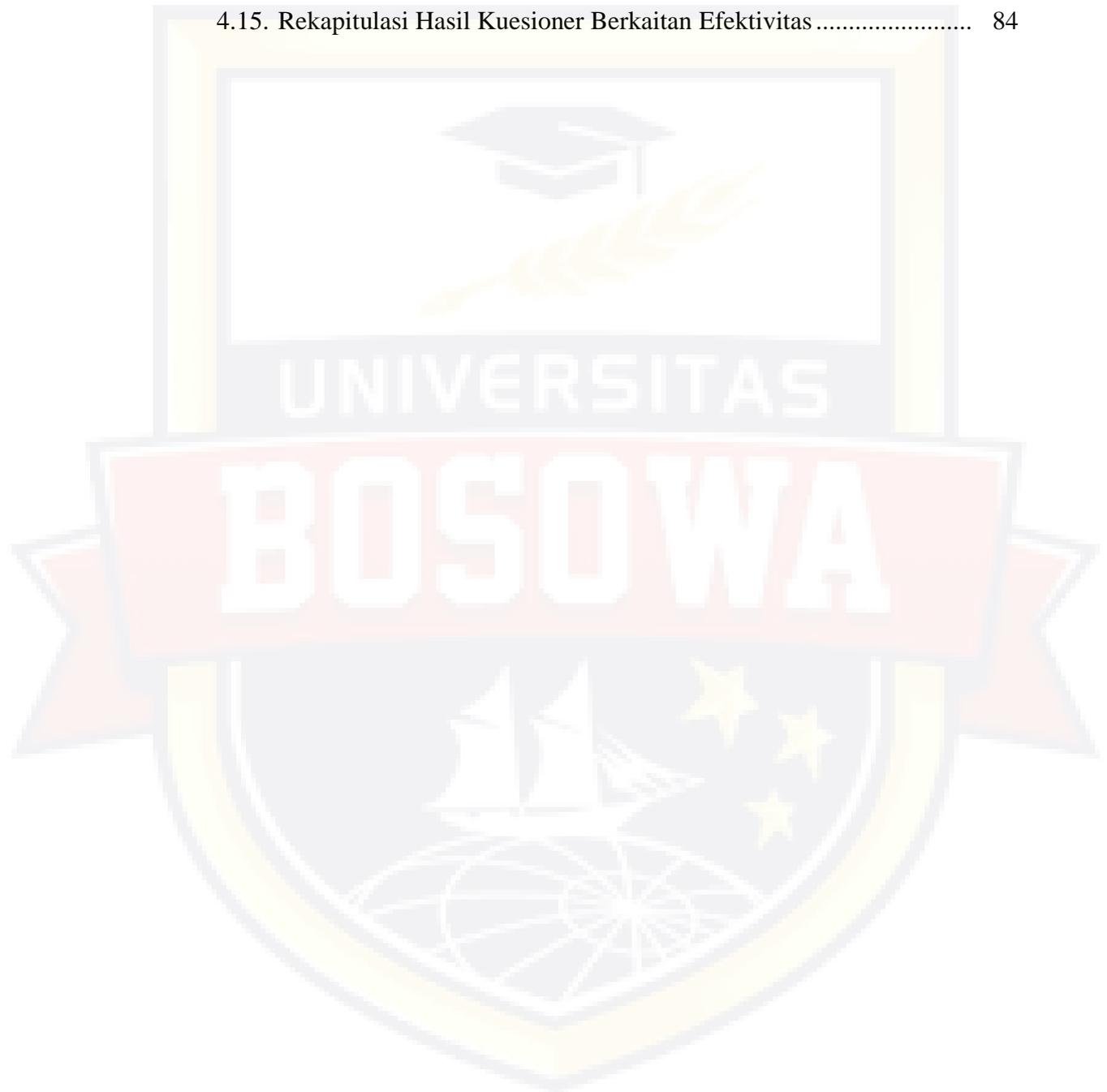


DAFTAR TABEL

Tabel

1.1. Daftar Anggaran Belanja Negara Tahun 2015-2019.....	8
1.2. Daftar Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2019	11
1.3. Daftar Capaian Dana Desa Tahun 2020.....	12
1.4. Daftar Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2014 dan 2018	13
1.5. Persentase Penduduk Miskin Indonesia	14
1.6. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bone.....	14
1.7. Daftar Rincian Dana Desa Kabupaten Bone	15
3.1. Skala Model Likert.....	37
4.1. Daftar Luas Wilayah Tiap Kecamatan Dan Jarak Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Ibu Kota Kabupaten.....	48
4.2. Daftar Luas Wilayah Kecamatan Bontocani.....	50
4.3. Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Desa Bana.....	52
4.4. Klustersasi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
4.5. Klasterisasi Berdasarkan Usia	63
4.6. Klasterisasi Berdasarkan Pendidikan	63
4.7. Klasterisasi Berdasarkan Partisipan Dana Desa.....	64
4.8. Simbol Skala likert Yang Digunakan.....	66
4.9. Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Bana.....	67
4.10. Hasil Uji Validitas Data Tingkat Fraud.....	70
4.11. Hasil Uji Validitas Data Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat	71
4.12. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Keterlibatan Masyarakat.....	75

4.13. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Berkaitan Manfaat	79
4.14. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Berkaitan Fraud	81
4.15. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Berkaitan Efektivitas	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar

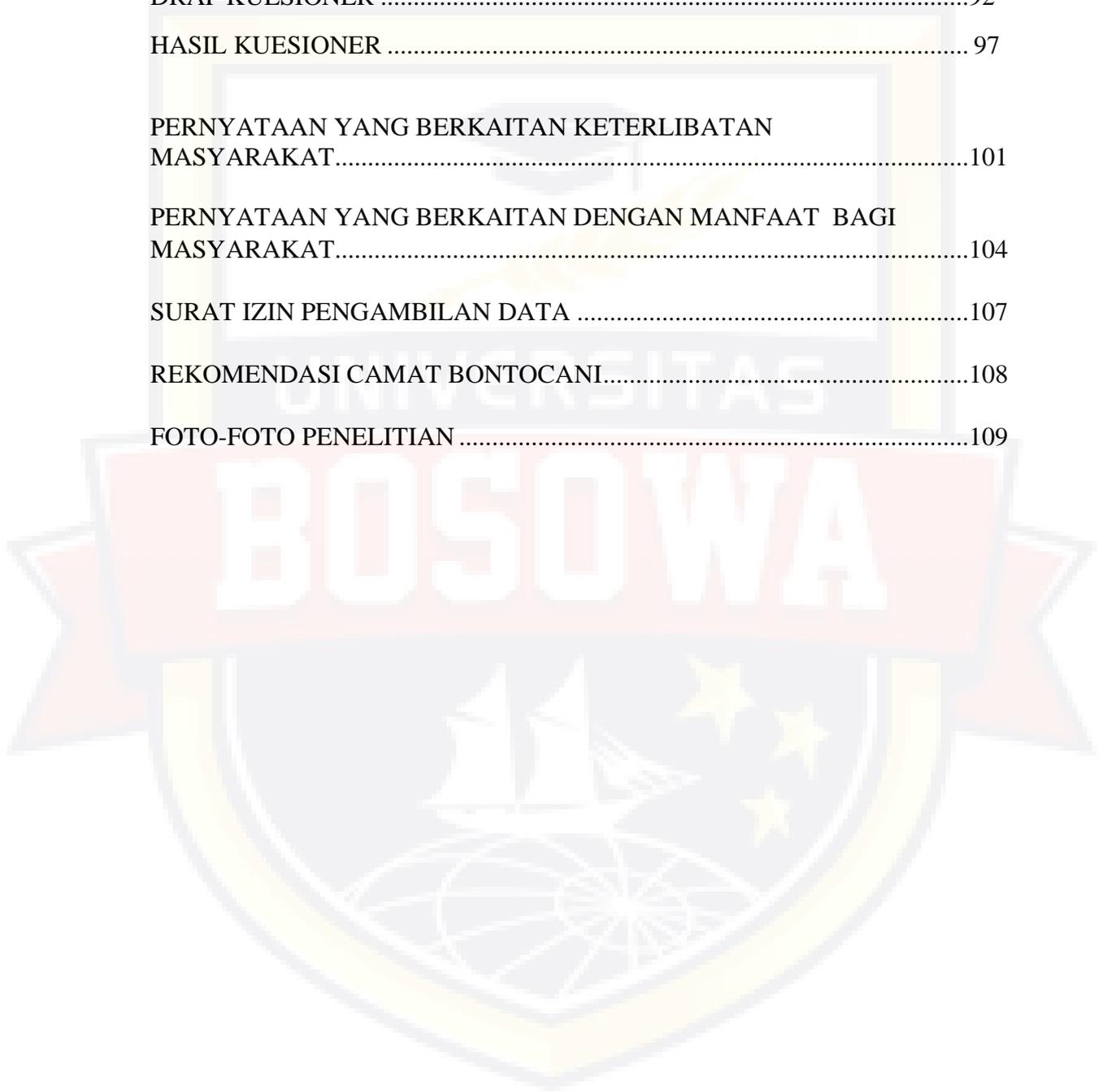
2.1. Kerangka Berfikir.....	31
3.1. Urutan Pembuktian Penelitian.....	40
3.2. Tahap Analisis Kualitatif	41
4.1. Sketsa Peta Sulawesi Selatan Kabupaten Bone.....	47
4.2. Sketsa Peta Kabupaten Bone Kecamatan Bontocani	49

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

DRAF KUESIONER	92
HASIL KUESIONER	97
PERNYATAAN YANG BERKAITAN KETERLIBATAN MASYARAKAT.....	101
PERNYATAAN YANG BERKAITAN DENGAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT.....	104
SURAT IZIN PENGAMBILAN DATA	107
REKOMENDASI CAMAT BONTOCANI.....	108
FOTO-FOTO PENELITIAN	109



**UNIVERSITAS
BOSOWA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap Tahun Pemerintah mengeluarkan anggaran ribuan triliun dana untuk keperluan belanja negara. Anggaran yang dikeluarkan secara umum dialokasikan dalam tiga bagian pokok yaitu untuk Kementrian/Lembaga, untuk Non Kementrian/Lembaga dan untuk Tansfer ke Daerah dan Dana Desa. Sesuai data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama lima tahun terakhir, Total Dana yang telah dikeluarkan Pemerintah sebanyak Rp 10.897,5 Triliun sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Anggaran yang paling rendah selama 5 tahun terakhir ini adalah Rp 2.039,5 Triliun yaitu pada Tahun 2015, sedangkan angka yang tertinggi selama 5 Tahun terakhir ini adalah Rp 2.461,1 Triliun yaitu pada Tahun 2019.

Tabel 1.1.
DAFTAR ANGGARAN BELANJA NEGARA TAHUN 2015-2019

No.	Tahun	Anggaran (satuan Triliun)
1	2015	2.039,5
2	2016	2.095,7
3	2017	2.080,5
4	2018	2.220,7
5	2019	2.461,1
Total		10.897,5

Sumber : APBN Kemenkeu 2020

Secara umum Anggaran Belanja merupakan biaya yang dianggarkan setiap tahun dan diperuntukkan dalam 3 alokasi secara umum, yang pertama yaitu untuk keperluan belanja Kementrian/Lembaga (K/L), yang kedua untuk keperluan belanja Non Kementrian/Lembaga (Non K/L) dan yang ketiga adalah untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pada informasi APBN Tahun 2016 diterangkan bahwa Belanja K/L terbagi atas 4 bagian, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial sedangkan untuk Belanja Non K/L terbagi beberapa bagian yaitu, belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial penanggulangan bencana dan belanja lain-lain. Untuk transfer ke daerah dan dana desa diperuntukkan untuk dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY, dana insentif daerah, dana transfer khusus, dana alokasi khusus non fisik, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana transfer umum dan dana untuk desa.

Pada Tahun 2014 telah dibuat aturan tentang Desa yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada kata pengantar Buku Saku Dana Desa, Ibu Sri Muliyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan menerangkan bahwa “Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”. Seperti yang dicantumkan pada pasal 4 UU tentang Desa ini, Ada 9 poin tujuan dalam pembuatan aturan desa ini, inti pada tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut, yang pertama memberikan pengakuan dan penghormatan

kepada Desa, kedua memberikan kejelasan dan kepastian hukum, ketiga melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat, keempat mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, kelima membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, keenam meningkatkan pelayanan publik, ketujuh meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, kedelapan memajukan perekonomian masyarakat Desa, dan kesembilan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Dari beberapa poin tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan UU tentang Desa adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada desa agar dapat menciptakan pengelolaan desa yang baik untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sedangkan pasal 72 ayat 1 pada UU ini diterangkan sumber pendapatan Desa yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa
2. Alokasi APBN
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
6. Hiba dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dengan adanya beberapa sumber pendapatan desa terutama pada poin 2, yaitu alokasi APBN atau Dana Desa, diharapkan Pemerintah Desa mampu mengelolah pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan layanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana desa mulai dianggarkan sejak Tahun 2015, pada website Kementerian Keuangan pada laman berita hasil dana desa sejak 2015 yang dipublikasikan pada tanggal 7 Januari 2019, jumlah anggaran dana desa pada Tahun 2015 adalah sebanyak 20,7 triliun, dan bertambah setiap tahunnya, sampai pada Tahun 2019 sudah mencapai 73 triliun.

Tabel 1.2.
DAFTAR ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2015-2019

No.	Tahun	Anggaran (satuan Triliun)
1	2015	20,7
2	2016	47
3	2017	50
4	2018	60
5	2019	73

Sumber : Publikasi Kemenkeu 2019

Jika dilihat Daftar Anggaran Dana Desa mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, besar anggaran Dana Desa meningkat sekitar 353% dari anggaran tahun pertama dibandingkan dengan anggaran lima tahun berikutnya. Melihat anggaran yang melonjat drastis tentu hal ini menjadi menarik untuk ketahu output dari anggaran Dana desa tersebut.

Berdasarkan data APBN 2020, Anggaran Dana Desa telah digunakan untuk membangun jalan desa sepanjang 191,6 ribu kilometer (km), Jembatan desa 1.140,4 km, Pasar desa 8.983 unit, BUMDes 37.830 kegiatan, Tambatan perahu 5.371 unit, Embung 4.175 unit, Irigasi 58.931 unit, Sarana Olahraga 19.526 unit, Penahanan tanah 192.974 unit, Sumur 45.169 unit, Air bersih 959.600 unit, Pendidikan Usia Dini (PAUD) 50.854 unit, Sarana MCK 240.587 unit, Drainase 29.557,9 ribu meter, Polindes 9.692 unit, Pos Layanan Terpadu sebanyak 24.820.

Tabel 1.3.
DAFTAR CAPAIAN DANA DESA TAHUN 2020

No.	Program	Jumlah	Satuan
1	Jalan Desa	191.600	Km
2	Jembatan Desa	1.140,4	Km
3	Pasar Desa	8.983	Unit
4	BUMDes	37.830	Kegiatan
5	Tambatan Perahu	5.371	Unit
6	Embung	4.175	Unit
7	Irigasi	58.931	Unit
8	Sarana Olahraga	19.526	Unit
9	Penahanan Tanah	192.974	Unit
10	Sumur	45.169	Unit
11	Air Bersih	959.600	Unit
12	PAUD	50.854	Unit
13	Sarana MCK	240.587	Unit
14	Drainase	29.557.900	Meter
15	Polindes	9.692	Unit
16	Posyandu	24.820	Unit

Sumber : Informasi APBN 2020

Desa tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang dikelola dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pada data BPS Tahun 2014 tercatat 20.432 desa tertinggal sedangkan pada Tahun 2018 berkurang menjadi 13.232.

Tabel 1.4.
DAFTAR JUMLAH DESA TERTINGGAL TAHUN 2014 DAN 2018

No.	Kategori Desa	Tahun 2014	Tahun 2018
1	Desa Tertinggal	20.432	13.232
2	Desa Tidak Tertinggal	53.661	60.438

Sumber : BPS Desa tertinggal 2014-2018

Berdasarkan Tabel Daftar Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2014 dan 2018 yang diperoleh dari BPS dijelaskan bahwa jumlah desa tertinggal pada Tahun 2014 berkurang sebanyak 7.200 desa pada Tahun 2018. Menurunnya jumlah desa tertinggal pada Tahun 2018 menggambarkan bahwa dengan adanya Dana Desa yang digelontorkan setiap tahunnya mampu menurunkan jumlah desa tertinggal yang tergolong cukup banyak. Disisi sudut pandang yang berbeda juga terlihat perubahan yang cukup drastis di persentase kemiskinan. Pada persentase kemiskinan di data BPS tercatat pada Tahun 2015 semester 2 adalah 14.09 % dan pada Tahun 2019 semester 2 adalah 12.60 %. Jika dibandingkan antara persentase kemiskinan Tahun 2015 dengan Tahun 2019 maka dapat dilihat bahwa angka kemiskinan menurun sebanyak 1,49% artinya selama 4 Tahun Masyarakat miskin yang ada di Indonesia berkurang sebanyak 1.49% dari seluruh penduduk Indonesia.

Tabel 1.5.
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN INDONESIA

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penduduk Miskin	14,09 %	13,96 %	13,47 %	13,10 %	12,60 %

Sumber : BPS Nasional

Jelas terlihat bahwa persentase kemiskinan menurun setiap tahunnya, hal ini bisa menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa secara umum Dana Desa mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dua hal tersebut yaitu jumlah desa tertinggal dan persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan terhadap meningkatnya Dana Desa. Tetapi hal itu tidak menjadi acuan untuk menetapkan bahwa setiap wilayah mengalami penurunan persentase tingkat kemiskinan pada tingkat wilayah/kabupaten tertentu contohnya salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bone. Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Bone sesuai dengan data BPS Kabupaten Bone, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bone, 2010-2018 update terakhir pada tanggal 9 Januari 2020 tercatat bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan persentase tingkat kemiskinan dari 10,12% pada tahun 2015 menjadi 10,55% pada tahun 2018.

Tabel 1.6.
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN BONE

Tahun	2015	2016	2017	2018
Persentase Penduduk Miskin	10,12 %	10,07 %	10,28 %	10,55 %

Sumber : BPS Kab. Bone 2020

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terluas di Provinsi Sulawesi dengan jumlah desa terbanyak di provinsi tersebut. Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Bone adalah sebanyak 328 Desa. Berdasarkan rincian dana desa per Kabupaten/Kota pada Buku Saku Dana Desa, Kabupaten Bone adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima anggaran Dana Desa terbesar diantara kabupaten lainnya yaitu sebesar Rp 286.729.589.000,- dengan Alokasi Dasar sebesar Rp 202.161.160.000,- Alokasi Formula sebesar 57.948.578,- dan Alokasi Afirmasi sebesar Rp 26.691.851.000,- adapun Alokasi Dasar per Desa yaitu sebesar Rp 616.345.000,-

Tabel 1.7.
DAFTAR RINCIAN DANA DESA KABUPATEN BONE

No.	Jenis Alokasi	Anggaran (Rp)
1	Alokasi Dasar (328 Desa x Rp 616.345.000)	202.161.160.000,-
2	Alokasi Formula	57.948.578.000,-
3	Alokasi Afirmasi	26.619.851.000,-
Total		286.729.589.000,-

Sumber : *Buku Saku Dana Desa*

Berdasarkan pemaparan informasi anggaran Dana Desa yang setiap tahun bertambah dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone yang setiap tahun semakin meningkat sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Menurut pendapat Todaro (1997) menyatakan bahwa indikator kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, perbedaan sejarah, sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia, perbedaan sektor swasta dan negara, struktur industri, politik, kekuasaan

dan kelambagaan dalam negari. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktor kemiskinan adalah faktor geografis. Berdasarkan pendapat tersebut maka lokasi penelitian yang diambil sebagai sampel adalah Kecamatan Bontocani, Bontocani merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone yang terluas diantara kecamatan lainnya. Kecamatan Bontocani juga merupakan kecamatan yang terjauh dari dari Ibu Kota Kabupaten Bone dengan jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten adalah 112 km. Kecamatan Bontocani terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan, diantara beberapa desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Bontocani, sesuai dengan data BPS Kecamatan Bontocani Desa Bana merupakan Desa yang terluas dan termasuk desa dataran tertinggi di Bontocani. Berdasarkan keterangan tersebut, hal ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai sasaran studi kasus dalam penelitian dengan judul Analisis Tingkat Fraud Dana Desa terhadap Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat studi kasus Kecamatan Bontocani

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi Anggaran Dana Desa yang setiap Tahun semakin meningkat seharusnya tingkat kemiskinan pun juga harus menurun setiap tahunnya tetapi salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bone malah tingkat kemiskinannya semakin tinggi, maka berdasarkan data tersebut yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Seberapa besar tingkat keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa?

2. Seberapa besar manfaat yang dirasakan Masyarakat setelah adanya Dana Desa?
3. Bagaimana pengaruh tingkat *fraud* anggaran dana desa terhadap efektivitas pembedayaan masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Keterkaitan antara latar belakang dengan rumusan masalah dapat dipahami dengan terlihat dengan jelas ditujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Persentase kemiskinan yang semakin bertambah sedangkan anggaran dana desa meningkat membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam pengelolaan dana desa tersebut, terlebih pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan tersebut, sebab anggaran yang dikelolah oleh beberapa pihak dengan satu pihak tentulah mendapatkan hasil yang berbeda terutama pada persoalan ide, manajemen dan pengawasan. Keterliban masyarakat merupakan acuan untuk mengetahui pengelolaan yang lebih transparan, manajemen yang lebih efektif dan pengawasan yang lebih baik. Selain itu dapat juga menjadi refensi untuk mengukur tingkat efektivitas pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk menganalisa keberhasilan Dana Desa dalam mewujudkan Desa yang mandiri, melihat program-program yang dibutuhkan masyarakat dan menganalisa hubungan komunikasi pemerintah dengan masyarakat

dengan mengaitkan program yang diadakan oleh pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

3. Untuk mengetahui lebih dalam dalam manajemen pengelolaan anggaran Dana Desa, menganalisa keberhasilan program Dana Desa serta menjadikan sampel untuk menentukan kebijakan dalam manajemen pengelolaan yang lebih baik.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk menentukan keputusan selanjutnya dalam pengelolaan dana desa termasuk penentuan keputusan untuk melibatkan sumber daya manusia, menentukan program yang lebih dibutuhkan masyarakat dan penentuan kebijakan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, menentukan manajemen pengelolaan Dana yang transparan dan lebih ketat.
2. Manfaat yang diperoleh masyarakat adalah tumbuhnya rasa kesadaran pada diri sendiri akan pentingnya peran serta dalam mewujudkan Desa yang mandiri sehingga pada pengelolaan dana desa selanjutnya bisa berperan aktif mengawal dan ikut terlibat dalam penentuan dan pelaksanaan program kerja yang didanai pada anggaran Dana Desa.
3. Dengan selesainya penelitian ini, Pengelolan Desa akan lebih terarah dalam pembangunan Dana Desa. Desa akan menjadi lebih maju dari sebelumnya, pengalaman pengeololaan desa akan bertambah.

4. Menambah pengetahuan peneliti terkait anggaran dana desa, program dan output dari anggaran dana desa, menambah pengalaman penulis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan anggaran desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Commonwealth Fraud Control Guideliner Australia (2002) dalam tulisah hukum/infokum/tematik BPK RI mendefinisikan *fraud* sebagai pemerolehan keuntungan dengan cara penipuan/kecurangan atau sejenisnya, definisi ini meliputi pencurian, memperoleh properti, keuntungan dengan kecurangan, memberikan informasi yang tidak benar kepada publik, menggunakan dokumen palsu, penyuapan, korupsi atau penyalahgunaan jabatan tindakan melawan hukum dengan penggunaan komputer milik publik, kendaraan, telpon dan properti atau jasa lainnya, tindakan pelanggaran atau penyelewengan yang mengakibatkan kebangkrutan dan tindakan lainnya yang sejenisnya.

Pada konsep *Fraud Triangle* (Segitiga Kecurangan), kecurangan terjadi disebabkan 3 faktor yaitu tekanan, kesempatan dan pembenaran. Tekanan dikategorikan sebagai salah satu faktor terjadinya kecurangan karena hal ini dapat mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Menurut Lister (2017) mendefinisikan Tekanan (*Pressure*) sebagai “sumber panas untuk api” namun tidak berarti karena tekanan yang ada pada diri seseorang, orang tersebut melakukan kecurangan. Ada tiga jenis tekanan yang memotivasi seseorang atau kelompok melakukan kecurangan diantaranya adalah:

1. *Employment pressure*, dimana individu tertekan untuk melakukan kecurangan karena tuntutan pekerjaan atau target kerja.

2. *External pressure*, seperti ancaman stabilitas keuangan, ekspektasi pasar
3. *Personal pressure*, dimana seseorang melakukan kecurangan karena gaya hidup

Kesempatan atau peluang adalah situasi yang memungkinkan individu melakukan kecurangan pada manajemen pengelolaan program. Tuanakotta mendefinisikan kesempatan (*Opportunity*) sebagai peluang untuk melakukan kecurangan seperti dipresepsikan pelaku kecurangan. Menurut Cressey ada dua komponen peluang melakukan kecurangan yaitu,

1. *General Information*, yaitu pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi, pengetahuan ini diperoleh dari pelaku yang ia lihat atau dengar.
2. *Tehncial Skill*, keahlian yang dimiliki seseorang dan menyebabkan seseorang tersebut mendapat kedudukan. Tanpa kemampuan yang memadai menyembunyikan kecurangan tentu tidak mungkin dilakukan apalagi kasus-kasus korupsi yang bersifat sistemik.

Pembenaran atau rasionalisasi merupakan faktor kecurangan yang sangat sulit untuk diukur, Rasionalisasi yang dilakukan seseorang dengan beragam alasan tetapi akan selalu ada pembenaran didalamnya. Menurut Tunggal (2011) rasionalisasi merupakan sikap karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai melakukan tindakan yang tidak jujur atau mereka yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalkan tindakan yang tidak jujur. Sedangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi seseorang mencari pembenaran untuk tindakannya melakukan kecurangan menurut Mustikasari (2013) antara lain sebagai berikut,

1. Mencontoh atasan atau rekan kerja
2. Merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi
3. Menganggap yang diambil tidak disengaja
4. Dianggap hanya sekedar meminjam dan pada waktunya akan dikembalikan.

2.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan, pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris. Menurut Webster dalam Sedermayanti (2000:144) kata “Empower” mengandung dua arti yang pertama adalah “*To Give Power or Authority To*” yang dapat diartikan dengan memberi kekuasaan, memberi kekuatan, mendelegasi otoritas pada pihak lain. Arti yang kedua adalah “*To Give Ability To or Anable*” yang dapat diartikan sebagai upaya memberi kemampuan atau keberdayaan.

Dalam konteks pembangunan, Pemberdayaan pada dasarnya bukan istilah baru sejak adanya kesadaran bahwa faktor manusia sangat berperan penting dalam pembangunan. Yang dimaksud dengan Pemberdayaan oleh Carizon dan Macauley (1998:46) adalah membebaskan seseorang dari yang kaku dan memberi kebebasan

orang untuk bertanggungjawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya. Hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Carver dan Clatter Back (1995:12) yaitu upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.

Adapun pengertian lain yang terkait dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995)
2. Pemberdayaan merupakan suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupan (Rappaport, 1984)
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swif dan Levin 1987)
4. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai, pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan orang yang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, Etal, 1994)

Pada laman wikipedia, Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial

untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Dikatakan berhasil jika masyarakat tersebut sudah menjadi penggerak, bukan penerima manfaat. Pada konsep Suhartono (2004), Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat desa yang tertulis pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah dituliskan di atas tentang pemberdayaan masyarakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan kekuatan kepada sekelompok orang pada suatu wilayah tertentu untuk dapat hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan dari pihak luar dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat menjadi subjek pembangunan.

2.3. Pengertian Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya pada perbedaan antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagian 2001:24).

Menurut Ravianto, Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. (2014:11). Sedangkan menurut Gibson et.al, efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan “standar” maka mereka dinilai semakin efektif. (Bungkaes 2013:46) Menurut Wiyono, Efektivitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. (2007:137). Menurut Abdurrahmat, Efektivitas adalah manfaat sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya. (2003:92)

Melihat dari beberapa pendapat para ahli yang telah ditulis sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan dengan hasil yang diperoleh sesuai dengan target. Jika dikaitkan dengan program kerja maka efektivitas berarti terealisasinya suatu program kerja yang telah

direncanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan serta sesuai dengan target yang diharapkan.

2.4. Dana Desa

Dana Desa adalah Anggaran yang dikeluarkan Pemerintah untuk dikelola oleh perangkat desa dengan tujuan membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Pada buku saku dana desa pengertian dana desa adalah Dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Adapun tujuan dana desa berdasarkan buku saku dana desa antar lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengubah paradigma pengaturan Desa. Desa yang dulunya hanya dianggap sebagai objek pembangunan sekarang sudah menjadi sasaran subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada 13 asas yaitu, Rekognisi, Kebersamaan, Subsidiaritas, Keberagaman, Kegotong-royongan, Kekeluargaan, Masyawarah, Demokrasi, Kemandirian, Parisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan dan Keberlanjutan. Adapun Dasar Hukum penyelenggaraan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu

- Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa
- PP 47/2015 tentang Perubahan atas 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa
- Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendes No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala

Desa

- Permendes No. 2/2015 tentang Musyawarah Desa
- Permendes No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa
- Permendes No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes
- Permendes No. 19/2015 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa TA 2018
- Perka LKPP No. 13/2013/2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015.
- PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- PMK No. 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa.
- PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- PKM No. 50PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK No. 112/PMK.07/2017

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Khalida Shuha (2018), dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa studi kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alunh

Kabupaten Padang Pariman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sedangkan pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan desa. Faktor Penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alun yaitu sumber daya manusia keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkatkan tingkat pendidikan dan pelatihan.

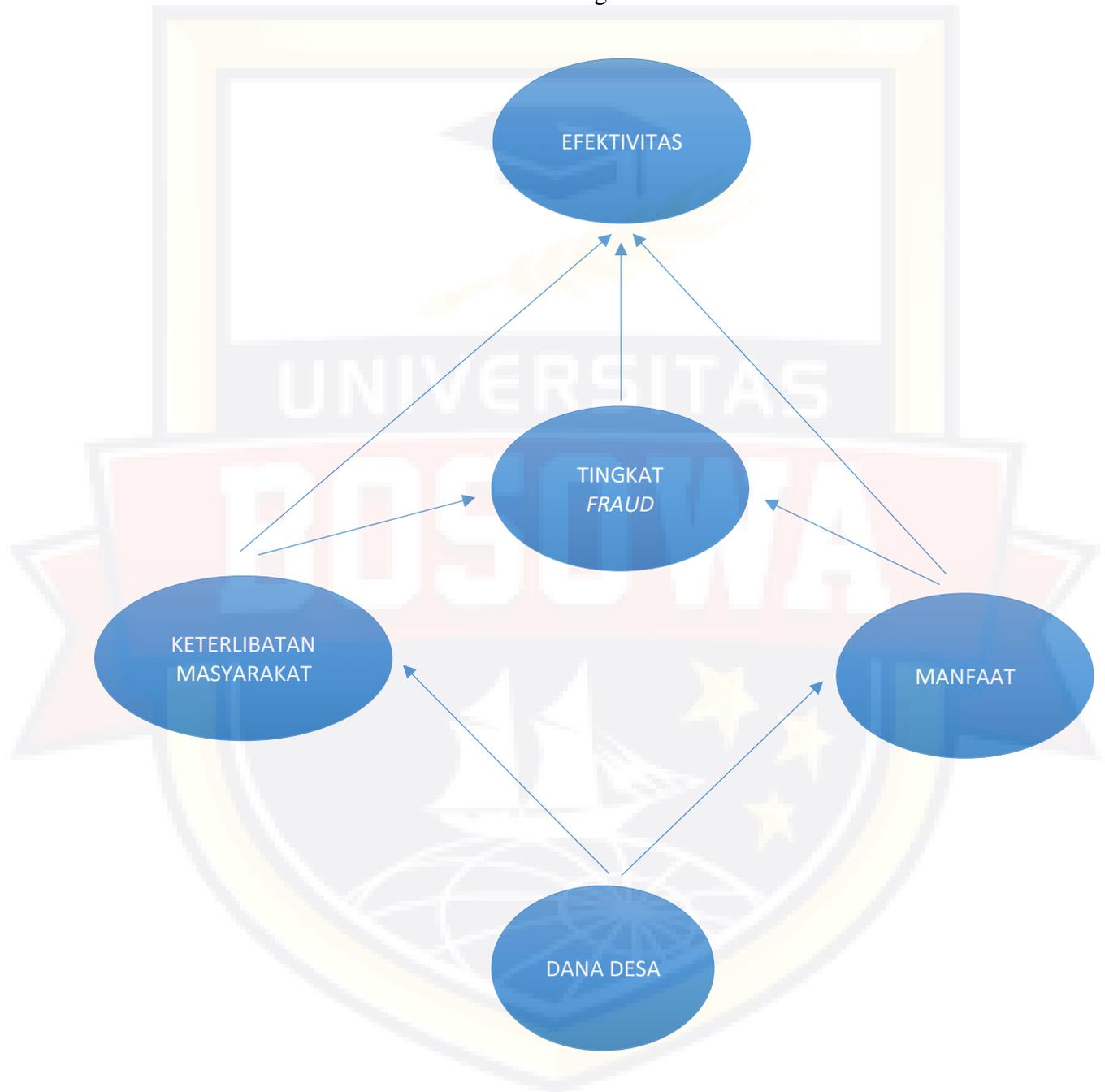
Penelitian Adriana Ida Ndapa (Tahun 2015), metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah para pelaksana ADD. Dan aspek-aspek implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah aspek komunikasi, sumberdaya. Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi serta teknik pengumpulan data berdasarkan data yang ada. Analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. Dalam implementasi kebijakan ADD di kecamatan kanatang, fenomena pencapaian tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai, ini terlihat dari rendahnya kontribusi PADes yaitu 7,36 % dan dana ADD 59,75%, swadaya gotong royong memberikan kontribusi 0,67% dan kontribusi dari dana partisipasi masyarakat 1,04%. Dari fenomena belum tercapainya pencapaian ADD hasil analisis dari aspek komunikasi

disimpulkan bahwa aspek komunikasi cukup efektif, aspek sumberdaya kurang efektif dan aspek sikap pelaksana kurang efektif, serta aspek struktur organisasi belum berjalan efektif.



2.6. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1.
Kerangka Berfikir



2.7. Hipotesis

Berdasar pada latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pikir maka hipotesis yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Diduga Masyarakat tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program kerja Dana Desa .
2. Diduga Program Kerja Dana Desa kurang bermanfaat bagi Masyarakat
3. Diduga tingkat *fraud* dana desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono (2015), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Berdasarkan data BPJS Kabupaten Bone, Kecamatan Bontocani adalah daerah yang terluas diantara Kecamatan lainnya yaitu seluas 463,35 km² dengan persentase 10,16% dari luas wilayah Kabupaten Bone. Kecamatan Bontocani terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan yaitu kelurahan Kahu, Desa Pattuku, Desa Bonto Jai, Desa Bulu Sirua, Desa Bana, Desa Pammusureng, Desa Watang Cani, Desa Langi, Desa Ere Cinnong, Desa Lamoncong, dan Desa Mattiro Walie. Penelitian ini rencana akan dilakukan selama kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan.

3.3. Populasi dan Sample

Populasi dalam hal ini merupakan sekumpulan objek pada suatu wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian untuk memecahkan sebuah masalah dan menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini populasi yang dimaksud adalah Masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani. Berdasarkan data pada situs *bana.opendesa.id* jumlah penduduk desa tersebut tercatat 2.584 jiwa, yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan usia, yaitu usia 0-5 Tahun sebanyak 134 jiwa, usia 6-17 Tahun sebanyak 554 Jiwa, 18-30 Tahun sebanyak 620 jiwa dan kelompok terakhir 31-120 Tahun sebanyak 1.276. Jadi pengambilan sampel pada penelitian menggunakan kriteria umur dari usia 18 Tahun sampai 120 tahun karena populasi yang cukup banyak dan wilayah yang cukup luas maka peneliti menggunakan rumus slovin dengan asumsi tingkat kesalahan 10% dengan rumus sebagai berikut,

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{1.996}{1 + (1.996 \cdot 10\%^2)}$$

$$n = 95,2$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi penelitian

e = Tingkat Kesalahan

Hasil perhitungan rumus slovin menerangkan bahwa dari 1.996 populasi penelitian dengan tingkat kesalahan 10%, mendapatkan nilai sebesar 95,2 karena nilai yang didapatkan adalah angka pecahan, maka angka tersebut dibulatkan menjadi 95. Dari hasil perhitungan tersebut ditarik kesimpulan bahwa jumlah masyarakat yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian ini adalah sebanyak 95 Orang. Adapun kriteria yang akan dijadikan sebagai sampel adalah berusia minimal berusia 18 tahun sampai dengan usia 64 Tahun.

3.4. Variabel Penelitian

Penelitian ini meliputi 2 variabel, pertama adalah variabel X meliputi keterlibatan Masyarakat dan Manfaat yang dirasakan Masyarakat sedangkan yang kedua adalah variabel Y yaitu meliputi tingkat fraud dan efektivitas pemberdayaan masyarakat.

Keterlibaran Masyarakat merupakan ukuran untuk mengetahui peran Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan program-program yang didanai oleh anggaran dana desa. Adapun indikator untuk mengukur variabel ini adalah seberapa sering masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan dana desa tersebut yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

Manfaat yang dirasakan Masyarakat adalah segala hal yang dirasakan masyarakat maupun hal yang membuat masyarakat lebih mudah melakukan aktivitasnya atau lebih mudah memenuhi kebutuhannya. Indikator untuk mengukur variabel ini adalah melihat seberapa banyak dan seberapa sering program-program hasil Dana Desa yang digunakan.

Tingkat Fraud merupakan besarnya perbedaan antara laporan pertanggung jawaban pemerintah setempat dengan realisasi yang terjadi dilapangan. Indikator untuk mengukur variabel ini adalah jumlah program kerja yang terealisasi di lapangan dan jumlah program kerja yang dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat merupakan ukuran keberhasilan program dana desa untuk mencapai tujuannya. Indikator untuk mengukur variabel ini adalah membandingkan program kerja yang terealisasi dengan target program kerja.

3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari 3 instrumen yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mendapatkan informasi atau data dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas guna untuk menunjang hasil penelitian yang lebih jelas.

2. Kuesioner

Kuesioner pada awalnya berasal dari kata *Questionnaire*, artinya suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan suatu topik permasalahan yang diberikan kepada setiap individu dengan tujuan untuk memperoleh suatu informasi atau data.

3. Skala

Skala adalah sebuah nilai pada setiap jawaban yang diterima dari hasil pertanyaan yang diberikan kepada individu. Skala yang dipakai pada penelitian ini adalah skala Likert yaitu,

Tabel 3.1.
SKALA MODEL LIKERT

Skala	Keterangan	Pernyataan Positif
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-Ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2017)

3.6. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan salah satu hal yang penting untuk menentukan metode pengumpulan data sehingga pada akhirnya bisa menunjang hasil olah data pada penelitian yang akan dilakukan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Kuantitatif, dalam penelitian ini juga digunakan data kualitatif yang diukur dalam bentuk angka. Adapun sumber data yang digunakan dalam metode pengumpulan data ialah sebagai berikut;

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan melalui observasi yang dilakukan di Desa tersebut, melalui hasil wawancara Masyarakat dan

melalui hasil kuesioner yang dibagikan kepada Masyarakat Kecamatan Bontocani.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber informasi publik, data penelitian sebelumnya, dokumentasi atau data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait. Data yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh bukan langsung dari masyarakat setempat tetapi diperoleh dari data Kantor Kepala Desa, Kantor Camat dan BPS Kabupaten Bone.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini akan digunakan akan digunakan beberapa metode yaitu, observasi, interview, kuesioner dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Mengamati hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan pada penelitian termasuk aktivitas masyarakat, program-program yang telah terealisasi selama adanya Dana Desa termasuk sarana dan prasarana yang telah dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, penggunaan atau pemanfaatan sarana tersebut oleh masyarakat selain itu juga mengamati aktivitas Pemerintah dalam penggunaan dana desa.

2. Wawancara

Interviu atau yang biasa disebut dengan wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi atau data pendukung untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Teknik ini biasanya dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait, contoh untuk penelitian ini adalah Masyarakat, Badan Perwakilan Masyarakat dan Perangkat Desa. Selain dari itu wawancara merupakan suatu cara mendapatkan informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersusun kemudian ditanyakan kepada pihak yang terkait.

3. Kuesioner

Kuesioner atau Angket, teknik ini hampir sama dengan teknik wawancara hanya saja teknik ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah disusun secara sistematis untuk dijawab sesuai dengan pilihan yang telah disediakan. Kuesioner ini akan dibagikan kepada Masyarakat Kecamatan Bontocani dan kepada perangkat-perangkat Desa maupun Kecamatan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data-data yang telah diolah dan sudah terpublikasikan oleh sumber informasi baik itu berupa buku laporan, karya ilmiah atau arsip dan lain-lain. Dokumentasi ini bisa didapatkan di kantor Pemerintah setempat, Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi bisa juga dilakukan dengan cara yang sama dengan metode pengumpulan data dengan teknik keperpustakaan yaitu dengan melihat buku bacaan

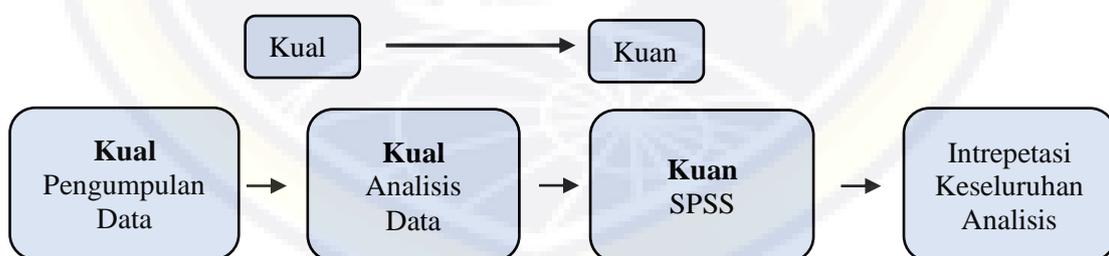
atau semacamnya yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penilaian yang akan dilakukan serta mejadi referensi untuk menyimpulkan hasil penelitian.

3.8. Teknik Analisis Data

Setelah metode pengumpulan data, metode selanjutnya ialah metode analisa data, untuk menganalisa kedua data menggunakan metode “*Sequential Exploratory Strategi*” yaitu menggunakan metode kualitatif pada tahap awal dan pada tahap selanjutnya menggunakan metode kuantitatif. Sepeti yang dijelaskan oleh *Creswell*, 2009, sebagai berikut,

“Sequential Exploratory Strategy in mixed methods research involves a first phase of qualitative data collection and analysis followed by a second phase of quantitative data collection and analysis that builds on the results of the first qualitative phase”.

Gambar. 3.1.
Urutan Pembuktian Penelitian

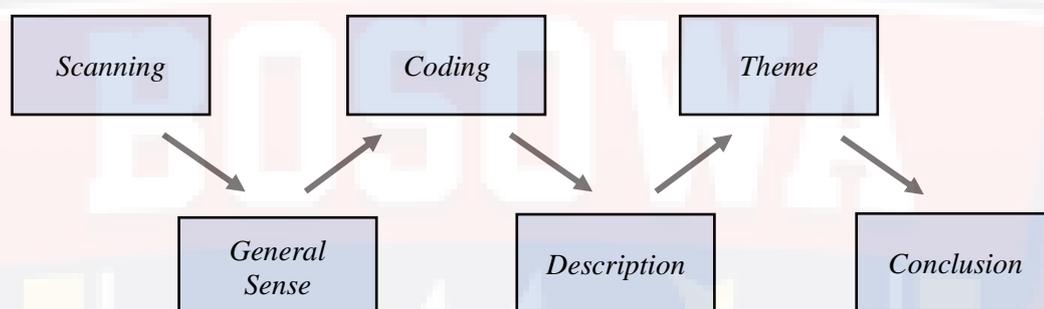


Pada metode ini, tahap pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data kualitatif dan melakukan analisis data, sedangkan tahap kedua ialah menganalisis data kuantitatif dengan menggunakan software pendukung *Statistical Product and*

Service Solution (SPSS). Selanjutnya adalah menganalisis data keseluruhan dan membuat kesimpulan dari hasil analisis keseluruhan. Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisa data dengan penjelasan yang diperoleh dari masyarakat setempat dengan metode wawancara sedangkan Analisa data Kuantitatif adalah untuk menghitung hasil skor dan persentase yang diperoleh setelah dilakukan analisa data untuk memperjelas hasil perolehan analisis kualitatif.

Menganalisa data kualitatif dapat dilakukan dalam beberapa cara diantaranya sebagai berikut,

Gambar 3.2.
Tahap Analisis Kualitatif



Pada tahap pertama *Scanning* melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung oleh indra manusia, melalui wawancara, pemindaian dokumen-dokumen serta melalui media-media informasi lainnya. Tahap kedua *General Sence* yaitu menentukan gagasan umum pada informasi yang diperoleh dari tahap pertama yang sebelumnya telah dikelompokkan sesuai keterkaitannya. Tahap ketiga *Coding* yaitu mengaitkan setiap gagasan umum yang diperoleh dari tahap ke dua, Tahap keempat *Descriptio* yaitu memberikan gambaran hasil penelitian setelah mengaitkan semua gagasan umum yang diperoleh. Tahap kelima *Theme* yaitu menentukan tema pada gambaran yang didapatkan dan tahap terakhir

adalah *Conclusion* yaitu menarik sebuah kesimpulan mulai tahap mengumpulkan informasi sampai dengan tahap penentuan tema pada hasil yang telah digambarkan.

Untuk menganalisa data kuantitatif terkait keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja yang dibiayai dana desa serta manfaat yang dirasakan masyarakat setelah adanya program dana desa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Keterlibatan atau Manfaat (\%)} = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Hasil persentase yang diperoleh

N = Jumlah skor Maksimal

n = Jumlah skor yang diperoleh

Selanjutnya menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat menurut Gibson 2013:46 efektivitas merupakan penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok serta organisasi, semakin dekat prestasi mereka terhadap suatu prestasi yang diharapkan (standar) maka itu dinilai semakin efektif. Pada analisis ini, mengukur efektivitas pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengaitkan antara target yang akan dicapai dengan hasil yang diperoleh setelah adanya Dana Desa, hasil yang dimaksud meliputi proses pemanfaatan sumber daya pada wilayah tersebut dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Adapun perhitungannya dilakukan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektif = \frac{\sum_{j=1}^n X}{\sum_{j=1}^n Y} \geq 1$$

Keterangan :

X = Output Dana Desa

Y = Target Dana Desa

Jika hasilnya sama dengan 1 (satu) atau lebih besar dari pada 1 (satu) maka dikatakan efektif tetapi jika hasilnya lebih kecil dari pada 1 (satu) maka dikatakan tidak efektif.

Untuk analisis tingkat fraud Dana Desa sesuai dengan skema *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFFE), menggunakan 3 indikator. Indikator yang dimaksud adalah *Corruption*, *Asset Misappropriation* dan *Fraudulent Statement*. Menentukan hasil analisa tersebut menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Hasil dari pengumpulan data akan dianalisis menggunakan software *Statistical Product and Service Solution* (SPSS).

3.9. Rencana Validitas dan Reabilitas Data

Pada penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif yang perlu diperhatikan adalah valid, reliable dan objektif. Validasi adalah derajat ketepatan antara data yang terdapat dilapangan dan data yang dilaporkan oleh peneliti. Kalau dalam objek penelitian terdapat warna merah, peneliti akan melaporkan warna merah. Kalau dalam objek penelitian ditemukan tingkat kecurangan dalam pengelolaan anggaran dana desa tinggi maka akan penelili melaporkan bahwa tingkat kecurangan tinggi. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan objek data tersebut

dinyatakan tidak valid. Pada dasarnya kegunaan data (setelah diolah dan dianalisis) ialah sebagai dasar yang objektif didalam proses pembuatan keputusan-keputusan atau kebijakan dalam rangka memecahkan persoalan oleh pengambil keputusan. Keputusan yang baik hanya bisa diperoleh dari pengambilan keputusan yang objektif, dan didasarkan atas dasar data yang akurat.

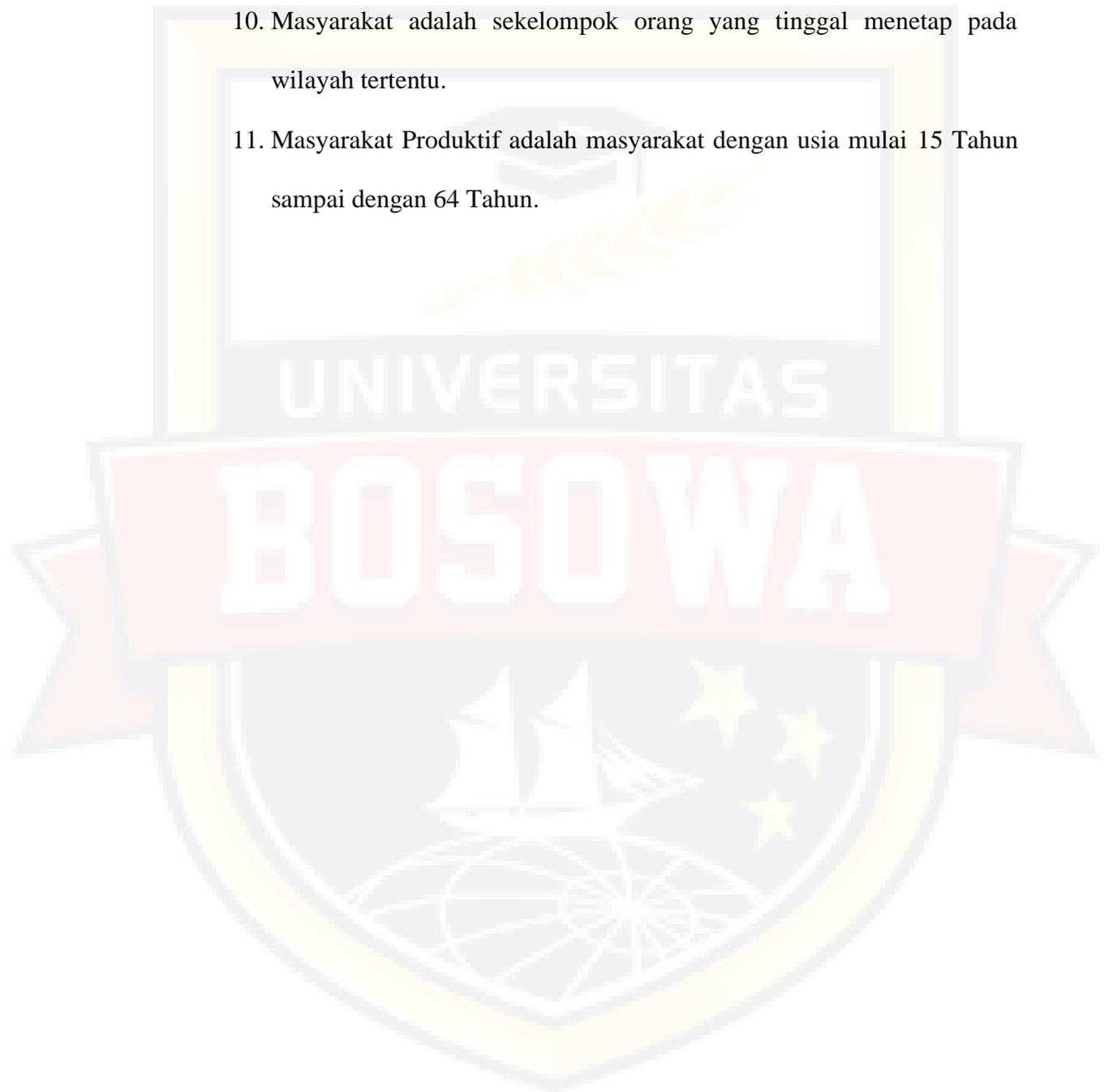
3.10. Definisi Operasional

1. Tingkat *Fraud* adalah peluang terjadinya kecurangan pada penggunaan Dana Desa.
2. Efektivitas adalah terlaksananya suatu program dengan hasil yang sesuai dengan yang direncanakan
3. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat sehingga tercapai masyarakat yang mandiri.
4. Dana Desa adalah Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan masyarakat desa demi menunjang keberhasilan pemberdayaan masyarakat.
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah terdiri dari 5-9 Orang ditetapkan secara demokratis.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden yang memegang kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang disebut dengan Pemerintah.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu dengan perangkat Desa

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, masyarakat.

10. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal menetap pada wilayah tertentu.

11. Masyarakat Produktif adalah masyarakat dengan usia mulai 15 Tahun sampai dengan 64 Tahun.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Kabupaten Bone

Bone merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan luas wilayah 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulsel yang terdiri dari 27 Kecamatan dan 372 desa/kelurahan (bone.go.id). Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Timur Indonesia. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4°13' -5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT dengan rincian lahan sebagai berikut:

- Persawahan	: 88.449	Ha
- Tegalan/Ladang	: 120.524	Ha
- Tambak/Empang	: 11.148	Ha
- Perkebunan Negara/Swasta	: 43.052,97	Ha
- Hutan	: 145.073	Ha
- Padang Rumput dan lainnya	: 10.503,48	Ha

Adapun batas wilayah bagian utara adalah Kabupaten Wajo dan Soppeng, di bagian timur Teluk Bone, di bagian selatan Kabupaten Sinjai dan Gowa dan batas wilayah di bagian barat Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru. Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26°C - 34°C selain dari kedua wilayah yaitu

Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Liburengn yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah bone bervariasi, yaitu rata-rata <math><1.750\text{ mm}</math>; 1750-2000 mm; 2000-2500 mm; 2500-3000 mm. Pada wilayah kabupaten Bone terdapat juga pengunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisinya sebagian ada yang berair pada musim hujan yang berjumlah sekitar 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar seperti sungai Walenae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-bulu, Salomekko, Tobunne dan Lekoballo.

Gambar 4.1.
SKETSA PETA SULAWESI SELATAN
KABUPATEN BONE



Sumber : *id.wikipedia.org*

Tabel 4.1.
DAFTAR LUAS WILAYAH TIAP KECAMATAN DAN JARAK DARI IBU
KOTA KECAMATAN KE IBU KOTA KABUPATEN

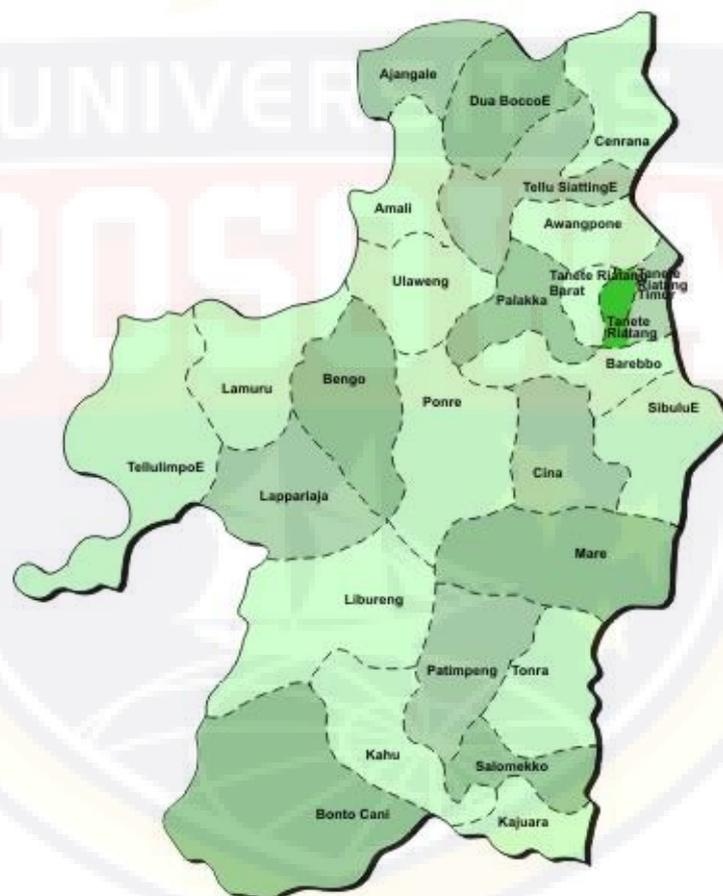
No.	Nama Kec.	Luas Wilayah (km ²)	Ibu Kota Kec.	Jarak dari Ibu Kota Kab.
1	Bontocani	463,35	Kahu	112 km
2	Libureng	344,25	Camming	83 km
3	Tellu Limpoe	318,10	Tujue	74 km
4	Ponre	293,00	Lonrong	30 km
5	Mare	263,50	Kadai	37 km
6	Lamuru	208,00	Lalebata	62 km
7	Tonra	200,32	Bulu-bulu	52 km
8	Kahu	189,50	Palattae	100 km
9	Bengo	164,00	Bengo	44 km
10	Ulaweng	161,67	Taccipi	17 km
11	Tellu Siattinge	159,30	Tokaseng	17 km
12	Sibulue	155,80	Pattiro Bajo	15 km
13	Cina	147,50	Tanete Harapan	17 km
14	Dua Boccoe	144,90	Uloe	30 km
15	Cenrana	143,60	Ujung Tanah	38 km
16	Ajangale	139,00	Pompanua	46 km
17	Lappariaja	138,00	Matango	51 km
18	Patimpeng	130,47	Latobang	77 km
19	Kajuara	124,13	Bojo	70 km
20	Amali	119,13	Taretta	36 km
21	Palakka	115,32	Passippo	12 km
22	Barebbo	114,20	Apala	9 km
23	Awangpone	110,70	Componge	8 km
24	Salomekko	84,91	Manera	62 km
25	Tanete Riattang Barat	53,68	Macanang	0 km
26	Tanete Riattang Timur	48,88	Lonrae	8 km
27	Tanete Riattang	23,79	Salekoe	3 km
BONE		4559,00	WATAMPONE	

Sumber : BPS Kabupaten Bone 2015 diolah

4.1.2. Kecamatan Bontocani

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2015 Bontocani merupakan kecamatan terluas diantara 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone dengan luas wilayah 463,35 km². Selain itu Bontocani juga merupakan kecamatan terjauh di Ibukota kabupaten. Wilayah Bontocani berada di bagian selatan Kabupaten Bone.

Gambar 4.2.
SKETSMA PETA KABUPATEN BONE
KECAMATAN BONTOCANI



Sumber : WordPress.com

Wilayah Bontocani berada pada daerah ketinggian rata-rata 142,6 km dari permukaan air laut. Daerah yang paling rendah adalah Desa Watang Cani dengan

ketinggian 110 km dari permukaan air laut, sedangkan Daerah yang paling tinggi adalah Desa Bana dengan ketinggian 244 km dari permukaan air laut. Bontocani terdiri dari 1 Kelurahan dan 10 Desa, 1 Kelurahan yang dimaksud adalah Kelurahan Kahu, sedangkan 10 Desa itu adalah, Desa Pattuku, Desa Bonto Jai, Desa Bulu Sirua, Desa Bana, Desa Pammusurang, Desa Watang Cani, Desa Langi, Desa Ere Cinnong, Desa Lamoncong dan Desa Mattiro Walie. Luas rata-rata setiap desa adalah 42,12 Km², dan Desa yang paling luas adalah Desa Bana dengan luas wilayah 69,16 Km², sedangkan Desa paling kecil adalah Desa Lamoncong dengan luas 29,42 Km².

Tabel 4.2.
DAFTAR LUAS WILAYAH KECAMATAN BONTOCANI

No.	Nama Desa	Luas Wilayah (km ²)
1	Kel. Kahu	34,26
2	Pattuku	30,24
3	Bonto Jai	51,25
4	Bulu Sirua	42,19
5	Bana	69,16
6	Pammusureng	32,30
7	Watang Cani	50,53
8	Langi	59,20
9	Ere Cinnong	35,04
10	Lamoncong	29,42
11	Mattiro Walie	29,76
Bontocani		463,35

Sumber : BPS Kab. Bone 2018

Sedangkan untuk Letak Desa dan Kelurahan, dari 10 Desa dan 1 Kelurahan berada pada letak bukan tepi laut. Jarak Ibukota Desa ke Ibukota Kecamatan rata-rata sekitar 20 km. Kecamatan Bontocani terdiri dari 41 Dusun dan 4 Lingkungan, Desa Bana dan Bonto Jai terdiri 6 dusun, Desa Pammusureng dan Langi terdiri dari 5 Dusun, Desa Watang Cani dan Bulu Sirua terdiri dari 4 Dusun, Desa Pattuku, Ere Cinnong dan Desa Mattiro Walie terdiri dari 3 Dusun, Desa Lamoncong terdiri dari 2 Dusun Dan Kelurahan Kahu terdiri dari 4 Lingkungan. Selain itu Jumlah penduduk yang ada di wilayah Bontocani berdasarkan sumber proyeksi Penduduk Kabupaten Bone 2010-2020 adalah sebanyak 15.769 jiwa. Jumlah penduduk yang paling banyak dalam satu desa adalah 2.391 jiwa yang bertempat tinggal di Desa Bana, dan Jumlah penduduk yang paling sedikit dalam 1 Desa adalah 343 jiwa di Desa Lamoncong.

4.1.3. Desa Bana

Desa Bana adalah desa yang terluas di Kecamatan Bontocani dengan Luas 69,16 km² jika dalam bentuk persentase sekitar 14,93% dari Luas Kecamatan Bontocani, selain terluas dari desa lain, Desa Bana juga termasuk daerah dataran tinggi bahkan tertinggi dari semua desa yang adala di Bontocani. Tinggi Daerah Bana dari permukaan air laut adalah 244 meter. Adapun batas-batas wilayah Desa Bana adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulusirua
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupupaten Sinjai

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kahu dan Desa Pammusureng

Sedangkan jenis iklim yang sering terjadi di Desa Bana adalah iklim tropis yaitu dengan 2 musim yaitu musim kemarau dengan musim hujan. Hal ini menjadikan Desa Bana tergolong desa yang sangat potensial pada bidang pertanian. Selain dari itu Desa Bana terdiri dari 6 Dusun dan 17 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 2.584. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.306 sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1278. (bana.opendesa.id). Jika dikelompokkan menurut usia penduduk di Desa Bana sebagian besar berada dikelompok usia stengah baya yaitu usia 31 Tahun sampai usia 120 Tahun sebanyak 1276 jiwa. Adapun jumlah penduduk yang berusia 18 Tahun sampai dengan 30 Tahun adalah 620 jiwa, selebihnya adalah usia balita dan remaja. Sedangkan jika dirata-ratakan Masyarakat Desa Bana berada dikelompok usia 31-120 Tahun.

Tabel 4.3.
DAFTAR JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA
DESA BANA

Kelompok Usia	Jumlah
0-5 Tahun	134
6-17 Tahun	554
18-30 Tahun	620
31-120 Tahun	1276
Total	2584

Sumber : bana.opendesa.id

Beberapa jenis pekerjaan masyarakat Desa Bana adalah sebagai berikut, Mengurus Rumah Tangga, masyarakat ini pada umumnya adalah perempuan, selanjutnya Pelajar/Mahasiswa, Pensiunan, PNS, POLRI, Pedagan, Petani/Pekebun

dan Peternak. Pada statistik Pendidikan Kecamatan Bontocani dalam Angka 2020 Desa Bana pada Tahun 2017 terdapat 3 Sekolah Dasar dengan jumlah murid sebanyak 233 dan 1 Sekolah Menengah Perama dengan jumlah siswa sebanyak 115. Sedangkan berdasarkan laporan Statistik Tanaman Pangan, Penggunaan Lahan Desa Bana pada Tahun 2017, luas lahan sawah seluas 399 ha termasuk irigasi dan non irigasi. Luas lahan tegal/kebun 1.277 ha, Ladang/Huma 4.376 ha. Untuk data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bana pada Tahun 2017 adalah Rp 17.443.290,-.

4.1.4. Organisasi Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa

- Kepala Desa : Ishak, S.PdI
- Sekretaris Desa : Judarsa Yasin, SM
- Plt. Kepala Seksi Pemerintahan : Muhlisa
- Plt. Kepala Seksi Kesejahteraan : Judarsa Yasin
- Kepala Urusan Umum dan Perencanaan : Muhlisa
- Kepala Urusan Keuangan : Marhuma
- Kepala Dusun Bana : Umar
- Kepala Dusun Paku : A. Neneng. WN, S.Pd.
- Kepala Dusun Cippaga : A. Janaur
- Kepala Dusun Poa : Kamaruddin
- Kepala Dusun Oro : Hendri Jalam
- Kepala Dusun Bata Tengnga : Muhlis

Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Ketua BPD : Saleng
- Anggota I : Amir. C
- Anggota II : Agus
- Anggota III : Pahri
- Anggota IV : Muslimin Jaya
- Anggota V : Aminawati, S.Pd.
- Anggota VI : Ernawati, S.Pd.

4.1.5. Pendapatan Desa

Pada Peraturan Pemerintah Tahun 2014, Nomor 6 tentang Desa dijelaskan beberapa sumber pendapatan yaitu pertama pendapatan asli Daerah yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong, kedua alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketiga bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, keempat alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, kelima bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, keenam adalah hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, Pendapatan desa yang sah. Adapun jenis pendapatan pada Desa Bana diantaranya adalah hasil usaha dana, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa dan bunga bank.

4.1.6. Sistem Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, beberapa tahap dalam pembangunan desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa meliputi:

- Kepala Desa membentuk Tim Penyusunan RPJM Desa
- Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan
- Pengkajian Keadaan Desa
- Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
- Penyusun Rencana RPJM Desa
- Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Jumlah Anggota Tim RPJM paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang yang ditetapkan oleh keputusan Kepala Desa. Anggota Tim RPJM Desa terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota pada umumnya mempunyai struktur sebagai berikut :

- Kepala Desa selaku Pembina
- Sekretaris Desa selaku Ketua
- Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris
- Anggota yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat, atau unsur masyarakat lainnya.

Adapun tanggung jawab Tim RPJM, yaitu menyelaraskan arah kebijakan pembangunan, mengkaji keadaan Desa, menyusun rancangan RPJM Desa dan yang terakhir adalah menyempurnakan rancangan RPJM Desa. Tujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kota adalah mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan Desa. Selanjutnya tujuan pengkajian keadaan desa adalah mempertimbangkan konsiderasi objektif dan keadaan desa adapun langkah kerjanya adalah penyaluran data desa, penggalan gagasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa, dari hasil pengkajian tersebut dijadikan sebagai bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. Selanjutnya penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil tahap sebelumnya yaitu laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah dilakukan setelah laporan diterima dari Kepala Desa. Beberapa hal yang dibahas dalam musyawarah desa yaitu laporan hasil pengkajian keadaan Desa, rumusan arah kebijakan pembangunan yang berdasar pada Visi, Misi Kepala Desa, rencana prioritas penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa. Beberapa hal yang di diskusikan dalam bentuk kelompok diantaranya laporan hasil pengkajian keadaan desa, Kegiatan yang diprioritaskan Desa dalam waktu 6 tahun, sumber-sumber dana rencana kegiatan pembangunan Desa, rencana pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar Desa, kerjasama desa dengan pihak ketiga. Hasil dari musyawarah desa dituangkan dalam

berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. Tahapan penyusunan Rencana RPJM Desa

- Tim Penyusun RPJM Desa menyusun RPJM berdasarkan hasil kesepakatan dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa dengan lampiran dokumen rancangan RPJM Desa.
- Setelah itu berita acara berikan kepada Kepala Desa oleh Tim RPJM
- Diperiksa oleh Kepala Desa
- Apabila ada perbaikan Kepala Desa mengembalikan kepada Tim RPJM untuk diperbaiki setelah itu di setujui oleh Kepala Desa dan dilanjutkan dengan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

Adapun rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rancangan kebijakan atau kegiatan terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat seperti Tokoh Adat, Toko Agama, Toko Pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perempuan, pengrajin dan lain-lain. Membahas dan menyepakati rencana RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara. Untuk penetapan dan perubahan RPJM Desa dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- Kepala Desa memberikan arahan kepada Tim RPJM untuk melakukan perbaikan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa

- Menjadikan lampiran hasil rancangan RPJM pada rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa
- Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah bersama BPD, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Syarat dilakukannya perubahan RPJM Desa diantaranya terjadi peristiwa yang mendadak, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan lain-lain. Syarat lain untuk perubahan RPJM Desa adalah adanya perubahan kebijakan pemerintah baik ditingkat provinsi, maupun kabupaten kota. Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

RKPDes adalah singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa yaitu Program-program atau kegiatan yang telah disepakati pemerintah desa dengan masyarakat setempat termasuk BPD dan Tokoh lainnya untuk pelaksanaan selama 1 tahun kedepan. Rencana kerja pemerintah desa juga dapat diartikan bahwa RKPDes adalah penjabaran RPJM Desa yang telah direncanakan untuk 5 tahun kedepan atau satu periode pemerintahan Desa. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 114 tentang pedoman pembangunan desa, prosedur atau langkah-langkah penyusunan rencana kerja pemerintah desa ialah sebagai berikut:

- Penyusunan pembangunan desa melalui musyawarah desa.
- Pembentukan TIM Penyusun RKP Desa
- Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

- Pencermatan Ulang RPJM Desa
- Penyusunan Rencana RKP Desa
- Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa
- Penetapan RKP Desa

Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawara desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai pedoman pemerintah desa, dalam menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar usulan RKP Desa. Dalam musyawarah beberapa hal penting yang dilakukan adalah mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, membentuk Tim Verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian dibutuhkan yang berasal dari masyarakat setempat/perangkat daerah kabupaten/kota. Hasil dari musyarah ini diarsipkan dalam bentuk berita acara.

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dibentuk oleh Kepala Desa yang terdiri minimal 7 orang. Kepala Desa sebagai Pembina, Sekretaris Desa sebagai Ketua dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris dan Anggota terdiri dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat. Adapun tugas dan kegiatan Tim Penyusun RKP Desa adalah pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk desa, mencermati ulang RPJM Desa, menyusun rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program Kegiatan yang masuk ke Desa, pada tahapan ini kepala desa menyiapkan dokumen tentang pagu indikatif Desa dan perencanaan program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah

atau daerah yang akan menunjang penyusunan RKPDes oleh Tim RKP Desa selama 1 Tahun kedepan. Adapun pencermatan ialah rencana dana desa bersumber dari APBN, Rencana ADD yang merupan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari kabupaten. Rencana bagian dari halil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten /kota.

Pencermatan ulang RPJM Desa, Tim Penyusun RKP Desa mercermati kegiatan-kegiatan yang merupakan skala prioritas yang direncanakan dalam periode 1 tahun mendatang. Dari hasil cermaan tersebut nantinya menjadi pertimbangan untuk menyusun RKP Desa. Dan untuk penyusunan rencana RKP Desa berpedoman terhadap:

- Hasil kesepakatan musyawarah desa
- Pagu indikatif Desa
- Pendapatan Asli Desa
- Rencana Kegiatan pemerintah baik pemerintah privinsi maupun pemerintah kabupaten
- Jaring aspirasi masyarakat dari DPRD
- Hasil pencernatan ulang RPJM
- Hasil kesepakatan kerjasama antar desa
- Hasli kesepakatan Desa dengan pihak-pihak yang terlibat.

Selanjutnya Tim RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksanaan berdasarkan jenis rencana kegiatan. Rencana RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut :

- Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya

- Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
- Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga.
- Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten
- Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat desa.

Beberapa lampiran yang harus dilampirkan pada rancangan RKP Desa yaitu sebagai berikut:

- Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya
- Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang disepakati dari kerjasama antar desa yang bersangkutan.
- Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud diverifikasi oleh tim verifikasi.

Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan musyawarah desa, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyepakati RKP Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, dan perwakilan dari Kelompok Tani, Nelayan dan lain-lain. Adapun langkah-langkah dalam penetapan RKP Desa dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut :

- Hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara

- Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa untuk memperbaiki rancangan RKP Desa sesuai dengan hasil musyawarah
- Rencana RKP Desa dijadikan lampiran pada rencana peraturan Desa tentang RKP Desa.
- Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa kemudian dibahas bersama dengan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

4.2. Deskripsi Responden

Kuesioner dibagikan kepada 95 masyarakat dengan karakteristik yang berbeda-beda, beberapa karakteristik yang telah dikelompokkan terdiri dari Jenis Kelamin, Umur dan Pendidikan Terakhir berdasarkan hasil analisis SPSS ditemukan hasil seperti berikut ini :

Tabel 4.4.
KLAJERSASI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid L	54	56.8	56.8	56.8
P	41	43.2	43.2	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Hasil kuesioner diolah SPSS

Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan, jika dipersentasekan sebanyak 56,8% responden Laki-laki dan 43,2% responden Perempuan.

Tabel 4.5.
KLAsterisasi Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 18-25	12	12.6	12.6	12.6
26-35	17	17.9	17.9	30.5
36-45	36	37.9	37.9	68.4
46-55	23	24.2	24.2	92.6
56-64	7	7.4	7.4	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Hasil kuesioner diolah SPSS

Pengelompokkan berdasarkan usia dibedakan menjadi lima bagian yaitu pertama responden yang berusia 18 Tahun sampai dengan 25 Tahun, kedua usia 26 – 35 Tahun, ketiga 36 - 45 Tahun, keempat 46 - 55 Tahun dan yang terakhir adalah usia 56 Tahun sampai dengan 64 Tahun. Yang mendominasi usia responden pada penelitian ini berusia 36-45 Tahun yaitu sebanyak 37,9% dari total responden.

Tabel 4.6.
KLAsterisasi Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S1	5	5.3	5.3	5.3
SD	46	48.4	48.4	53.7
SMA	10	10.5	10.5	64.2
SMP	18	18.9	18.9	83.2
TTSD	16	16.8	16.8	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Hasil kuesioner diolah SPSS

Berdasarkan hasil kusioner yang disebar pada daerah penelitian didapatkan jenjang pendidikan responden terbanyak adalah tingkat Sekolah Dasar (SD) kemudian tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), selanjutnya jumlah responden urutan ketiga adalah responden yang Tidak Tamat Sekolah Dasar (TTSD), kemudian responden Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang paling sedikit adalah responden yang alumni Sarjana (S1).

Tabel 4.7.
KLAUSTERISASI BERDASARKAN PARTISIPAN DANA DESA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	61	64.2	64.2	64.2
Ya	34	35.8	35.8	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Hasil kuesioner diolah SPSS

Dari 95 responden pada penelitian ini, 35,8% diantaranya yang pernah terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa sedangkan 64,2% adalah responden yang tidak pernah terlibat dalam pengelolaan anggaran.

4.3. Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan data yang didapatkan dari beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh dijadikan data awal untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk dapat hubungkan sehingga akan memudahkan menentukan kesimpulan pada kasus yang diteliti.

4.3.1. Observasi

Observasi dilakukan beberapa bulan sebelum penelitian dan ditemukan beberapa program-program pemerintah desa termasuk pembinaan masyarakat masih kurang dan dari sisi pembangunan, beberapa pembangunan jalan sudah banyak yang rusak, tetapi beberapa juga program-program yang masih berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat seperti pengadaan alat dan pendistribusian hasil pertanian, pengembangan usaha budidaya lebah, pelatihan peternakan, pengelolaan kopi, pembuatan irigasi dan pengadaan alat pertanian sampai sekarang masih ada beberapa yang masih berjalan seperti usaha pengelolaan Kopi dan lain-lain.

4.3.2. Wawancara

Untuk hasil wawancara sedikit berbeda dengan hasil observasi, beberapa masyarakat mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sejak adanya dana desa sudah kelihatan hanya saja hasil dari program-program yang diadakan kurang memuaskan bagi sebagian masyarakat, tetapi dari sisi kepuasan masyarakat pemerintah desa sudah merasa bersyukur dalam pengelolaan Desa pada masa ini.

4.3.3. Kuesioner

Untuk hasil kuesioner, sebagian besar perangkat desa maupun masyarakat desa setuju dengan pengelolaan anggaran desa yang tidak sesuai dengan penggunaan anggaran dengan pencatatan. Dari 29 pertanyaan terdapat 10 pertanyaan untuk menganalisa tingkat fraud dana desa dan selebihnya adalah pertanyaan untuk menganalisa efektivitas pemberdayaan masyarakat. Pertanyaan yang ditujukan untuk perangkat desa serta orang-orang yang terlibat dalam

pengelolaan anggaran dana desa diajukan sebanyak 10 pertanyaan untuk menganalisa tingkat kecurangan, sedangkan pertanyaan yang jumlah 19 untuk menganalisa efektivitas pemberdayaan diajukan kepada masyarakat. Pada kuesioner ini skala yang digunakan adalah skala likert. Dengan skala likert maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan. (Sugiono 2013:168). Adapun gambaran dari skala likert adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8.
SIMBOL SKALA LIKERT YANG DIGUNAKAN

Simbol	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu-ragu	3
TS	Sangat Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiono 2013:168

4.3.4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen Pemerintah kecamatan maupun desa yang berkaitan dengan penelitian untuk dijadikan sebagai bahan penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal, adapun beberapa dokumen-dokumen yang didapatkan akan dijelaskan sebagai berikut,

Tabel 4.9.
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI
DANA DESA BANA

Tahun	Anggaran		Realisasi	
2015	Rp	311.945.000,-	Rp	311.945.000,-
2016	Rp	679.377.000,-	Rp	679.377.000,-
2017	Rp	864.987.000,-	Rp	864.667.200,-
2018	Rp	1.359.860.000,-	Rp	1.359.145.300,-
2019	Rp	1.506.220.000,-	Rp	1.400.804.000,-

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Desa Bana

Pada tahun 2015 anggaran dana desa bana tergolong sangat kecil dibandingkan dengan anggaran dana desa lima tahun terakhir. Dari anggaran dana desa yang disediakan dapat dimanfaatkan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari laporan realisasi penggunaan anggaran dana Desa Bana pada Tahun 2015. Jumlah anggaran disediakan sama besar dengan jumlah realisasi anggaran yaitu sebesar Rp 311.945.000,-.

Pada Tahun 2016 jumlah anggaran yang disediakan bertambah dua kali lipat dari tahun sebelumnya, dari Rp 311.945.000,- menjadi Rp 679.377.000 dengan jumlah anggaran yang terealisasi sama dengan jumlah yang dianggarkan. Beberapa program pemberdayaan yang dilakukan pada Anggaran Tahun 2016 adalah :

- Kegiatan pelatihan Kepada Desa, Perangkat Desa dan BPD
- Kegiatan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- Pengadaan alat pengolahan hasil pertanian
- Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat
- Kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Desa

Pada Tahun 2017 anggaran dana Desa Bana bertambah sebanyak Rp 185.160.000,- dari Tahun 2016. Dari laporan realisasi penggunaan anggaran terdapat perbedaan jumlah anggaran yang disediakan dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran, artinya anggaran pada Tahun 2017 masih tersisa sebesar Rp 319.800,-. Adapun program-program pemberdayaan masyarakat pada Tahun Anggaran 2017 adalah:

- Pengadaan Bibit Tanaman Pangan dan Perkebunan
- Pelatihan sistem keuangan Desa (Siskeudes)
- Pelatihan pengembangan usaha budidaya lebah
- Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan dan adat

Pada Tahun 2018, Anggaran dana desa meningkat dari sebelumnya tercatat Rp 864.987.000,- meningkat sebanyak Rp 494.873.000,- sehingga total dana yang dikololah oleh Pemerintah Desa Bana sebesar 1.359.860.000,- dalam satu tahun. Pengelolaan dana ditujukan untuk beberapa program, program yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat setempat diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pelatihan Kader Teknik
- Pelatihan Peternakan
- Pelatihan Pengolahan Kopi

Pada program ini, peserta yang dilibatkan tidak lain adalah masyarakat di daerah tersebut yaitu masyarakat desa Bana. Anggaran Dana pada Tahun 2018 merupakan anggaran yang pertama mencapai 1 Milyar selama adanya program Dana Desa, Anggaran dana desa sebelumnya hanya berkisaran ratusan juta rupiah.

Adapun anggaran yang terealisasi pada Tahun 2018 hampir sepenuhnya tercapai, hanya tersisa sebesar Rp 714.700,-

Anggaran dana desa semakin hari semakin meningkat sehingga pada Tahun 2019 anggaran desapun kembali meningkat dibandingkan anggaran tahun-tahun sebelumnya, anggaran belanja negara pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.506.220.000,-. Seperti Tahun-tahun sebelumnya Anggaran Dana Desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan beberapa program-program pemberdayaan masyarakat pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Pengadaan Mesin pemotong Padi
- Pelatihan Pertanian
- Pembuatan irigasi 4 unit
- Bimtek Kepala Desa
- Pelatihan perangkat Desa

4.4. Pembahasan

Pada penelitian ini software yang akan digunakan untuk mengolah data dan menentukan hasil penelitian adalah *Statistical Product and Service Solution* (SPSS).

4.4.1. Uji Validitas Data Kuesioner

Uji validitas data merupakan suatu hal yang harus dilakukan pada penelitian yang menggunakan angket. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah angket

yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti benar valid atau tidak.

Berikut adalah hasil uji validitas menggunakan SPSS :

Tabel 4.10.
HASIL UJI VALIDITAS DATA TINGKAT FRAUD

		Total
X1	Pearson Correlation	.562**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X2	Pearson Correlation	.580**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X3	Pearson Correlation	.555**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X4	Pearson Correlation	.415**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X5	Pearson Correlation	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X6	Pearson Correlation	.573**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X7	Pearson Correlation	.598**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X8	Pearson Correlation	.565**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X9	Pearson Correlation	.559**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X10	Pearson Correlation	.624**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Total	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	95

Sumber : Hasil kuesioner tingkat fraud diolah SPSS

Dapat dilihat dari Tabel 4.10 bahwa dari pernyataan X1 sampai dengan pernyataan X10 tidak ditemukan data yang tidak valid. Mementukan keputusan pada uji validitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel, jika nilai r hitung $>$ r tabel maka dinyatakan valid sedangkan sebaliknya jika r hitung $<$ r tabel maka dinyatakan tidak valid. Sedangkan pada tabel 4.10. didapatkan r tabel sebesar 0,202 dan Total Pearson Correlation pada tabel tersebut tidak ada lebih kecil dari r tabel sehingga dinyatakan data X1 sampai dengan X2 dinyatakan valid.

Tabel 4.11.
HASIL UJI VALIDITAS DATA EFEKTIFITAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

		Total
X1	Pearson Correlation	.594**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X2	Pearson Correlation	.681**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X3	Pearson Correlation	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X4	Pearson Correlation	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X5	Pearson Correlation	.673**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X6	Pearson Correlation	.410**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X7	Pearson Correlation	.688**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95

X8	Pearson Correlation	.702**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X9	Pearson Correlation	.478**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X10	Pearson Correlation	.618**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X11	Pearson Correlation	.827**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X12	Pearson Correlation	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X13	Pearson Correlation	.695**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X14	Pearson Correlation	.694**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X15	Pearson Correlation	.772**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X16	Pearson Correlation	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X17	Pearson Correlation	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X18	Pearson Correlation	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X19	Pearson Correlation	.579**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Total	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	95

Sumber : Hasil kuesioner efektivitas pemberdayaan masyarakat diolah SPSS

Untuk hasil kuesioner efektivitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat nilai r_{tabel} yaitu 0.202 sedangkan hasil olahan data, menunjukkan total data *Pearson Correlation* semuanya lebih besar dari 0.202 atau data $r_{hitung} > r_{tabel}$ artinya data pada Tabel 4.11. yaitu X1 sampai dengan X19 dinyatakan valid.

4.4.2. Keterlibatan Masyarakat Mengelola Dana Desa

Rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini adalah seberapa tingkat keterlibatan dalam masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa, untuk mengetahui hal tersebut beberapa data hasil kuesioner dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan rumusan masalah tersebut. Terdapat tujuh pernyataan yang dapat menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa yaitu :

- Pernyataan Pertama

Bukan suatu masalah bagi saya, apabila persiapan partisipan anggaran ditunjuk langsung oleh kepala desa tanpa ada proses seleksi. Dari pernyataan ini bisa dianalisa bahwa jika jawaban responden mengatakan sangat setuju itu artinya masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan partisipan sebaliknya jika jawaban responden mengatakan bahwa sangat tidak setuju berarti keputusan menentukan partisipan diserahkan kepada Masyarakat. Jadi jika jawaban masyarakat adalah sangat setuju maka skor yang diberikan adalah 1 begitu juga sebaliknya jika responden memberikan jawaban Sangat tidak setuju maka skor yang diberikan adalah 5.

- Pernyataan ke Dua

Bukan suatu masalah bagi saya, apabila program telah disusun kemudian tinggal kami setuju. Artinya jika responden menyetujui pernyataan ini maka skor yang diberikan adalah rendah dan apabila tidak menyetujui maka skor yang diberikan adalah tinggi sebab jika program sisa disetujui oleh masyarakat berarti masyarakat tidak ikut menyusun program yang dibutuhkan dengan kata lain masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan program yang akan dilaksanakan.

- Pernyataan ke Tiga

Sosialisasi Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh desa sudah berjalan efektif. Jika Responden menyetujui maka skor yang didapatkan adalah tinggi sebaliknya juga seperti itu jika responden tidak menyetujui maka mendapatkan skor rendah karena jika sosialisasi dikategorikan efektif artinya informasi tentang dana desa sudah tersampaikan kepada seluruh masyarakat, hal ini sudah termasuk keterlibatan masyarakat pada proses sosialisasi baik perencanaan anggaran maupun sosialisasi penggunaan anggaran

- Pernyataan ke Empat

Proses Musyawarah desa perencanaan kegiatan alokasi Dana Desa berjalan melalui mekanisme yang benar. Mekanisme yang benar adalah melibatkan semua aspek-aspek dalam perencanaan kegiatan alokasi Dana Desa, tentu hal seperti ini jika dijawab Sangat setuju maka skor yang didapatkan adalah 5 begitu juga sebaliknya.

- Pertanyaan ke Lima

Proses pelatihan bagi pelaku alokasi Dana Desa sudah berjalan efektif artinya jika pelatihan berjalan efektif maka tentu yang dilibatkan adalah masyarakat.

- Pernyataan ke Enam

Sasaran bantuan alokasi Dana Desa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin, artinya masyarakat dilibatkan dalam penggunaan anggaran Desa, jadi jika responden menyatakan sangat setuju maka skor yang diberikan adalah lima.

- Pernyataan ke Tujuh

Pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa dilaksanakan secara gotong royong. Jika responden setuju dengan pernyataan ini maka itu termasuk hal yang melibatkan masyarakat dalam merealisasikan kegiatan alokasi dana desa.

Dari beberapa pernyataan yang telah diberikan kepada masyarakat yaitu 7 pernyataan yang telah dijelaskan di atas maka hasil dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12.

REKAPITULASI HASIL KUESIONER KETERLIBATAN MASYARAKAT		
No	Pernyataan	Jumlah Skor
1	Pernyataan 1	296
2	Pernyataan 2	280
3	Pernyataan 3	360
4	Pernyataan 4	370
5	Pernyataan 5	369
6	Pernyataan 6	286
7	Pernyataan 7	396
Total Skor		2357

Sumber : Data Kuesioner Penelitian

Berdasarkan teknik analisis yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa untuk menghitung tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Keterlibatan (\%)} = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Dimana n adalah jumlah skor dari Pernyataan 1 sampai Pernyataan 7 yang diperoleh dan N adalah total skor maksimal, (jumlah responden x skor maksimal) x jumlah pernyataan. sehingga didapatkan nilai seperti dibawah ini :

$$\text{Nilai n} = 2.357$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai N} &= (\text{Jumlah Responden} \times \text{skor maksimal}) \times \text{Jumlah Pernyataan} \\ &= (95 \times 5) \times 7 \\ &= 3.325 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Keterlibatan (\%)} &= \frac{2.357}{3.325} \times 100\% \\ &= 70,8 \% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa jumlah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan analisis kuantitatif adalah sebesar 70,8 %, artinya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Bana adalah sangat besar, dari hasil analisis berdasarkan hasil survei disimpulkan bahwa lebih dari setengah responden terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa.

4.4.3. Manfaat Dana Desa bagi Masyarakat

Dana Desa merupakan sebuah program pemerintah yang mulai terealisasi pada Tahun 2015, tentu hal ini merupakan waktu yang sudah lama dalam jika dibandingkan pada tahun sekarang. Beberapa tujuan diperuntukkan Dana Desa yaitu untuk pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Dari tujuan tersebut tentu sudah banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat sampai pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan maupun pemberdayaan. Dari pernyataan tersebut, penelitian ini akan mengukur besaran manfaat yang dirasakan masyarakat setelah adanya program dana desa, desa yang menjadi sampel penelitian adalah Desa Bana. Untuk menentukan keputusan yang akan diambil telah diedarkan kuesioner yang menunjang informasi yang akan didapatkan dalam menganalisa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Dari 29 pernyataan yang disiapkan dikuesioner terdapat 9 pertanyaan yang berkaitan dengan analisa yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk mengukur keterlibatan masyarakat. Berikut adalah pernyataan yang diberikan kepada Masyarakat;

1. Alokasi Dana Desa mampu memberikan informasi, menjawab pertanyaan, memberikan ulasan, gambaran dan analisis maupun memberikan saran kongkrit dan realistis yang berkaitan dengan program. Artinya jika responden mengatakah bahwa sangat setuju maka diberikan skor 5, sebaliknya juga seperti itu.
2. Alokasi Dana Desa mampu membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterlibatan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program.

3. Alokasi dana desa Mampu membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterampilan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program
4. Alokasi dana desa Mampu berperan sebagai orang yang dapat menengahi terjadinya perbedaan kepentingan antara kelompok atau individu di masyarakat.
5. Alokasi dana desa Mampu merangsang dan mendorong masyarakat untuk menemukan serta mengenali potensi diri masyarakat.
6. Alokasi dana desa Mampu menjalin hubungan komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat.
7. Alokasi dana desa mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
8. Alokasi dana desa mampu meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
9. Alokasi dana desa mampu memperluas kesempatan kerja.
10. Alokasi dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari ke 9 pernyataan di atas jika responden pernyataan disetujui maka skor yang diperoleh tinggi sebaliknya jika pernyataan tidak disetujui maka skor yang diperoleh hanya sedikit. Berikut adalah rekapan hasil kuesioner yang telah ditanggapi oleh Masyarakat :

Tabel 4.13.
REKAPITULASI HASIL KUESIONER BERKAITAN MANFAAT

No.	Pernyataan	Jumlah Skor
1	Pernyataan 1	374
2	Pernyataan 2	383
3	Pernyataan 3	358
4	Pernyataan 4	372
5	Pernyataan 5	388
6	Pernyataan 6	387
7	Pernyataan 7	382
8	Pernyataan 8	366
9	Pernyataan 9	376
	Total	3.386

Sumber : Hasil Kuesioner Penelitian

Untuk menentukan besar manfaat yang dirasakan Masyarakat, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Besar manfaat (\%)} = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Dimana n adalah jumlah skor dari Pernyataan 1 sampai Pernyataan 9 yang diperoleh dan N adalah total skor maksimal, (jumlah responden x skor maksimal) x jumlah pernyataan. sehingga didapatkan nilai seperti dibawah ini :

$$\text{Nilai n} = 3.386$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai N} &= (\text{Jumlah Responden} \times \text{skor maksimal}) \times \text{Jumlah Pernyataan} \\ &= (95 \times 5) \times 9 \\ &= 4.275 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Besar Manfaat (\%)} &= \frac{3.386}{4.275} \times 100\% \\ &= 79,2 \%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat berdasarkan analisa kualitatif adalah sebesar 79,2 % artinya sebagian besar masyarakat Desa Bana merasakan manfaat setelah adanya dana desa, dibuktikan dengan hasil analisis menggunakan beberapa metode.

4.4.4. Pengaruh Tingkat *Fraud* terhadap Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat

Secara kuantitatif menentukan pengaruh tingkat fraud terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS, tetapi pada awalnya dibutuhkan rekapan data dari keusioner yang telah diisi oleh masyarakat, berikut adalah beberapa pernyataan yang ada pada kuesioner yang berkaitan dengan tingkat fraud;

1. Suatu hal yang wajar di Desa saya, apabila untuk suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya
2. Bukan suatu masalah bagi desa saya, apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang,
3. Merupakan sesuatu yang wajar di Desa saya apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai kedalam belanja program dana desa
4. Suatu hal yang wajar apabila di Desa saya, para pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan.

5. Bukan suatu masalah bagi desa saya apabila perlengkapan, peralatan yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dibeli
6. Tidak menjadi suatu masalah bagi desa saya apabila suatu transaksi dana desa memiliki bukti pendukung ganda
7. Suatu hal yang wajar apabila di desa saya ditemukan adanya pengeluaran dana desa tanpa dokumen pendukung
8. Bukan suatu masalah bagi desa saya, apabila sisa anggaran dibagikan.
9. Bukan suatu masalah bagi saya, apabila partisipan anggaran ditunjuk langsung oleh kepala desa tanpa ada proses seleksi
10. Bukan suatu masalah bagi saya, apabila program telah disusun kemudian tinggal kami setuju.

Dari 10 pernyataan diperoleh rekapan data setiap pernyataan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14.
REKAPITULASI HASIL KUESIONER BERKAITAN *FRAUD*

No	Variabel	Frekuensi	Persentase
1	X1	232	9,53%
2	X2	250	10,27%
3	X3	202	8,30%
4	X4	223	9,16%
5	X5	203	8,34%
6	X6	285	11,71%
7	X7	221	9,08%
8	X8	254	10,44%
9	X9	274	11,26%
10	X10	290	11,91%

Sumber : Hasil Kuesioner Penelitian

Dari hasil rekapitulasi kuesioner yang berkaitan dengan tingkat fraud diperoleh data terbesar yaitu 11,91 % pada variabel X10 artinya Nilai yang paling tinggi diantara sepuluh pernyataan yang ada pada kuesioner yang berkaitan dengan fraud adalah pernyataan ke 10 yaitu “Bukan suatu masalah apabila program telah disusun kemudian tinggal kami setuju” maksud dari pernyataan ini adalah masyarakat tidak ikut memberikan sumbangsi usulan program-program dalam rencana program penggunaan anggaran dana desa. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan memang mekanisme dalam penyusunan rencana program jangka menengah dikatakan bahwa masyarakat dilibatkan dalam musyawarah tersebut namun tidak semua masyarakat ikut pada kegiatan tersebut.

Sedangkan pernyataan kuesioner yang berkaitan dengan efektivitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat berikut ini;

1. Sosialisasi Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh Desa sudah berjalan efektif.
2. Proses musyawarah desa perencanaan kegiatan Alokasi Dana Desa berjalan melalui mekanisme yang benar
3. Proses pelatihan bagi pelaku Alokasi Dana desa sudah berjalan efektif.
4. Sasaran bantuan alokasi Dana Desa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin
5. Desa adalah lembaga yang dipercaya dan aspiratif untuk mendorong timbul dan berkembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat.

6. Pelaksanaan kegiatan Alokasi dana desa dilaksanakan secara gotong royong.
7. Pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa menggunakan teknologi yang sederhana, tepat, dan biaya murah
8. Penggunaan dana pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah sesuai dengan rencana program sehingga bantuan tidak menyimpang
9. Pengawasan pengadaan barang dan jasa kegiatan alokasi dana desa di lapangan cukup efektif untuk menghindari kecurangan
10. Waktu pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di lapangan sesuai dengan rencana program
11. Alokasi dana desa Mampu memberikan informasi, menjawab pertanyaan, memberikan ulasan, gambaran analisis maupun memberikan saran yang kongkrit dan realistis yang berkaitan dengan program
12. Alokasi dana desa Mampu membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterampilan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program
13. Alokasi dana desa Mampu berperan sebagai orang yang dapat menengahi terjadinya perbedaan kepentingan antara kelompok atau individu di masyarakat.
14. Alokasi dana desa Mampu merangsang dan mendorong masyarakat untuk menemukan serta mengenali potensi diri masyarakat.

15. Alokasi dana desa Mampu menjalin hubungan komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

16. Alokasi dana desa mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa

17. Alokasi dana desa mampu meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

18. Alokasi dana desa mampu memperluas kesempatan kerja.

19. Alokasi dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rekapan hasil kuesioner dari 19 pernyataan yang berkaitan tentang efektivitas pemberdayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 4.15.
REKAPITULASI HASIL KUESIONER BERKAITAN EFEKTIVITAS

No.	Variabel	Frekuensi	Persentase
1	Y1	360	5,02%
2	Y2	370	5,16%
3	Y3	369	5,15%
4	Y4	386	5,39%
5	Y5	389	5,43%
6	Y6	396	5,53%
7	Y7	382	5,33%
8	Y8	379	5,29%
9	Y9	376	5,25%
10	Y10	373	5,21%
11	Y11	374	5,22%
12	Y12	383	5,34%
13	Y13	358	5,00%
14	Y14	372	5,19%
15	Y15	388	5,41%
16	Y16	387	5,40%
17	Y17	382	5,33%
18	Y18	366	5,11%
19	Y19	376	5,25%

Sumber : Hasil Kuesioner Penelitian

Dapat dilihat dari hasil rekapitan Tabel 4.13 bahwa angka persentase yang paling tinggi adalah variabel Y5 hal ini menandakan bahwa masyarakat paling banyak yang sepakat bahwa “Desa adalah lembaga yang dipercaya dan aspiratif untuk mendorong timbul dan berkembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat.”

Adapaun rekapitan hasil uji regresi linear antara variabel X dan Y adalah sebagai berikut :

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tingkat_Fraud ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Efektivitas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.111 ^a	.012	.002	.54681

a. Predictors: (Constant), Tingkat_Fraud

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.345	1	.345	1.154	.285 ^a
	Residual	27.807	93	.299		
	Total	28.152	94			

a. Predictors: (Constant), Tingkat_Fraud

b. Dependent Variable: Efektivitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	4.226	.245		17.264	.000
	Tingkat_Fraud	-.100	.093	-.111	-1.074	.285

a. Dependent Variable: Efektivitas

Dari hasil analisis di atas menunjukkan pada kolom model yaitu constant menunjukkan angka 4.226 pada kolom Unstandardized Coefficients artinya angka ini merupakan angka konstan dari variabel Y (Efektivitas), apabila tidak ada nilai variabel X (Fraud) maka nilai variabel Y adalah 4.226. Pada kolom model yaitu Tingkat_Fraud memiliki nilai sebesar -0,100, angka ini berarti bahwa jika nilai variabel X bertambah 1 % maka variabel Y akan meningkat sebesar -0,100. Karena

angka ini adalah angka negatif (-) maka dikatakan berpengaruh negatif. Artinya jika angka fraud meningkat maka efektivitas akan menurun. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) adalah jika nilai Sig. lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh fraud terhadap efektivitas sebaliknya jika Sig. lebih besar dari probabilitas 0,05 maka fraud tidak berpengaruh pada efektivitas. Pada hasil olah data ini didapatkan nilai Sig adalah $0,285 >$ dari probabilitas 0,05 jadi hasil uji statistik menggambarkan bahwa tingkat fraud tidak signifikan terhadap efektivitas.

Dari hasil wawancara pada masyarakat setempat menyatakan bahwa pengelolaan anggaran dana desa sudah cukup baik menurut mereka sebab semua proses-proses mulai dari perencanaan program sampai dengan pelaksanaan program selalu dilibatkan. Mereka juga menganggap bahwa penganggaran dan pertanggung jawaban pun sudah termasuk transparan karena beberapa tempat dibuatkan baliho yang berisi rincian anggaran dana desa. Adapun manfaat yang mereka sampaikan pada saat diwawancara adalah lebih banyaknya usaha-usaha maupun ilmu-ilmu yang didapatkan selama adanya Desa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa analisis pada Bab sebelumnya ditemukan beberapa hal yang bisa menjadi kesimpulan dalam penelitian ini antara lain;

1. Dari hasil analisis keterlibatan masyarakat ditemukan bahwa kebanyakan masyarakat menyetujui bahwa “Pelaksanaan kegiatan alokasi Dana Desa dilaksanakan secara gotong royong”. Hal tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat dilibatkan dalam menyusun perencanaan program kerja Desa.
2. Berdasarkan analisis besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ditemukan bahwa masyarakat lebih banyak menyetujui “Alokasi dana desa Mampu merangsang dan mendorong masyarakat untuk menemukan serta mengenali potensi diri masyarakat”, hal ini berarti bahwa dengan adanya alokasi dana desa masyarakat bisa termotivasi untuk lebih mengenali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, dengan kata lain alokasi dana desa sangat bermanfaat bagi pengembangan sumber daya masyarakat.
3. Keterlibatan masyarakat dan manfaat yang dirasakan masyarakat merupakan penunjang dalam menentukan hasil analisis pengaruh fraud dana desa terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat. Adapun hasil uji statistik antara fraud dengan efektivitas pemberdayaan masyarakat

hasilnya adalah tidak signifikan artinya pengaruh tingkat fraud sangat kecil sehingga dikategorikan tidak signifikan. Beberapa hal yang menjadi faktor sehingga hasil analisis tidak signifikan dapat dilihat dari tingkat karakteristik responden, dari jenis kelamin, tingkat umur, dan lebih yang penting adalah tingkat pendidikan.

5.2. Saran

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan besarnya anggaran dana desa yang semakin meningkat terhitung dari Tahun 2015-2019, ada pula daerah yang berbanding lurus dengan angka kemiskinan sehingga sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Adapun saran yang dapat dipetik dari hasil penelitian yaitu pengelolaan anggaran dana desa baiknya didampingi oleh pihak-pihak pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mekanisme pengelolaan anggaran dana terlaksana dengan baik, selain itu pihak-pihak pemerintah mampu menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada di Desa serta menawarkan program-program yang bisa bermanfaat untuk masa depan bagi desa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. 1999. "Ekonomi Politik Pembangunan Bisnis Indonesia Era Orde Baru dan di Tengah Krisis Moneter". Malang Danar Wijaya. Brawijaya University Press.
- Amirullah dan Hanafi, Rindyah. 2002. "Pengantar Manajemen". Graha Ilmu Yogyakarta.
- Anonim, 2013. "Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat di Dalam dan di Sekitar Hutan". Departemen Kehutanan Direktorat Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Jakarta.
- Anwas, O.M. 2003. "Pemberdayaan Masyarakat di Era Global". Bandung. Alfabeta.
- As, Asdika. 2020. " Pengaruh Trust, Kepuasan Konsumen dan Brand Image terhadap Kinerja Pemasaran melalui Layalitas pada Perusahaan Transportasi Online di Makassar". Universitas Bosowa. Makassar.
- Awang, Sam Afri. 1995. "Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal dalam Program IDT". Jakarta. Adirya Media.
- Barthos, Basir. 1992. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendekatan Mikro. Cetakan Kedua, Bumi Aksara. Jakarta.
- Debora. 2006. Pengaruh Pemberdayaan Kerja dan Psikologi terhadap Kepercayaan Organisasi dan Kepuasan Kerja Dosen Tetap Perguruan Tinggi Swasta. Palangkaraya.
- Handoko, T. Hany. 1996. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. BPFE- Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hidayani, Rhisma, 2018. "Efektivitas Penggunaan Program Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada Fakultas Teknik Universitas Hasanauddin. Universitas Bosowa. Makassar
- Ida Ndapa, Adriana. 2015. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". TAPM. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Ridha, Fahrul. 2019. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota. Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.

- Rini. 2013. "Studi Pemberdayaan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja pada Sekretariat Kabupaten Polewali Mandar. Universitas 45 Makassar. Makassar.
- Prijono Onny, 1996. "Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi" Center for Strategic and International Studies. Jakarta
- Sajogyo Pudjiwati. 1995. "Sosiologi Pedesaan" Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Keperimpinan yang Baik) Rangka Otonomi Daerah. Mandar Maju. Bandung.
- Shuha, Khalida. 2018. "Analisis Pengelolaan Dana Desa studi kasus pada Desa-desanya Selingkungan Kecamatan Lubuk Alunh Kabupaten Padang Pariman". Ejournal. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Tahir. 2017. "Analisis Program Pengembangan Klaster Ketahanan Pangan terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Bawang Merah di Kabupaten Enrekang. Skripsi. Universitas Bosowa. Makassar.
- Usman, Syahriani. 2017. "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan" (Studi pada SKPD Kabupaten Luwu Timur). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.

KUESIONER

Kepada yth.

**Bapak / Ibu Saudara (i)
Calon Responden**

Dengan Hormat,

Sebelumnya perkenalkan nama saya **Tahir**, mahasiswa Program Pascasarjana/ Magister Universitas Bosowa. Saat ini saya sedang melakukan Penelitian yang berjudul **Analisis Tingkat Fraud Dana Desa terhadap Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bana**, Saya berharap Bapak/Ibu untuk berpartisipasi sekitar **5-10 menit** untuk mengisi **lembar kuesioner** yang akan saya berikan. Keberhasilan riset ini tergantung dari kemurahan hati Bapak/Ibu untuk meluangkan waktunya sebagai narasumber. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kerahasiaan jawaban yang saudara isi akan dijamin dan semata-mata hanya untuk menyelesaikan studi.

Demikian Permohonan saya, atas bantuan serta partisipasi Bapak/Ibu/ Saudara/i dalam pengisian kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

Makassar, 27 Agustus

2020

Hormat saya,

T A H I R

QUESTIONNAIRES**A. IDENTITAS RESPONDEN**

Mohon kesediaan Bapak / Ibu mengisi daftar berikut :

1. Nama : _____
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Umur : _____ Tahun
4. Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA S1 S2 S3
5. Apakah Anda pernah berpartisipasi dalam anggaran dana desa : Ya Tidak

B. DAFTAR PERTANYAAN

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (\checkmark) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/Ibu :

- SS = Sangat Setuju**
S = Setuju
RR = Ragu-Ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

FRAUD DANA DESA

No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Suatu hal yang wajar di Desa saya, apabila untuk suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya					
2.	Bukan suatu masalah bagi desa saya, apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang,					
3.	Merupakan sesuatu yang wajar di Desa saya apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai kedalam belanja program dana desa					
4.	Suatu hal yang wajar apabila di Desa saya, para pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan.					
5.	Bukan suatu masalah bagi desa saya apabila perlengkapan, peralatan yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dibeli					
6.	Tidak menjadi suatu masalah bagi desa saya apabila suatu transaksi dana desa memiliki bukti pendukung ganda					
7.	Suatu hal yang wajar apabila di desa saya ditemukan adanya pengeluaran dana desa tanpa dokumen pendukung					
8.	Bukan suatu masalah bagi desa saya, apabila sisa anggaran dibagikan.					
9.	Bukan suatu masalah bagi saya, apabila partisipan anggaran ditunjuk langsung oleh kepala desa tanpa ada proses seleksi					
10.	Bukan suatu masalah bagi saya, apabila program telah disusun kemudian tinggal kami setuju					
EFEKTIFITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
11.	Sosialisasi Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh Desa sudah berjalan efektif.					

No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
12.	Proses musyawarah desa perencanaan kegiatan Alokasi Dana Desa berjalan melalui mekanisme yang benar					
13.	Proses pelatihan bagi pelaku Alokasi Dana desa sudah berjalan efektif.					
14.	Sasaran bantuan alokasi Dana Desa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin					
15.	Desa adalah lembaga yang dipercaya dan aspiratif untuk mendorong timbul dan berkembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat.					
16.	Pelaksanaan kegiatan Alokasi dana desa dilaksanakan secara gotong royong..					
17.	Pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa menggunakan teknologi yang sederhana, tepat, dan biaya murah					
18.	Penggunaan dana pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah sesuai dengan rencana program sehingga bantuan tidak menyimpang					
19.	Pengawasan pengadaan barang dan jasa kegiatan alokasi dana desa di lapangan cukup efektif untuk menghindari kecurangan					
20.	Waktu pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di lapangan sesuai dengan rencana program					
21.	Alokasi dana desa Mampu memberikan informasi, menjawab pertanyaan, memberikan ulasan, gambaran analisis maupun memberikan saran yang kongkrit dan realistis yang berkaitan dengan program					
22.	Alokasi dana desa Mampu membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterampilan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program					
23.	Alokasi dana desa Mampu berperan sebagai orang yang dapat menengahi terjadinya perbedaan kepentingan antara kelompok atau individu di masyarakat.					
24.	Alokasi dana desa Mampu merangsang dan mendorong masyarakat untuk menemukan serta mengenali potensi diri masyarakat.					

No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
25.	Alokasi dana desa Mampu menjalin hubungan komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat.					
26.	Alokasi dana desa mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa					
27.	Alokasi dana desa mampu meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.					
28.	Alokasi dana desa mampu memperluas kesempatan kerja.					
29.	Alokasi dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.					

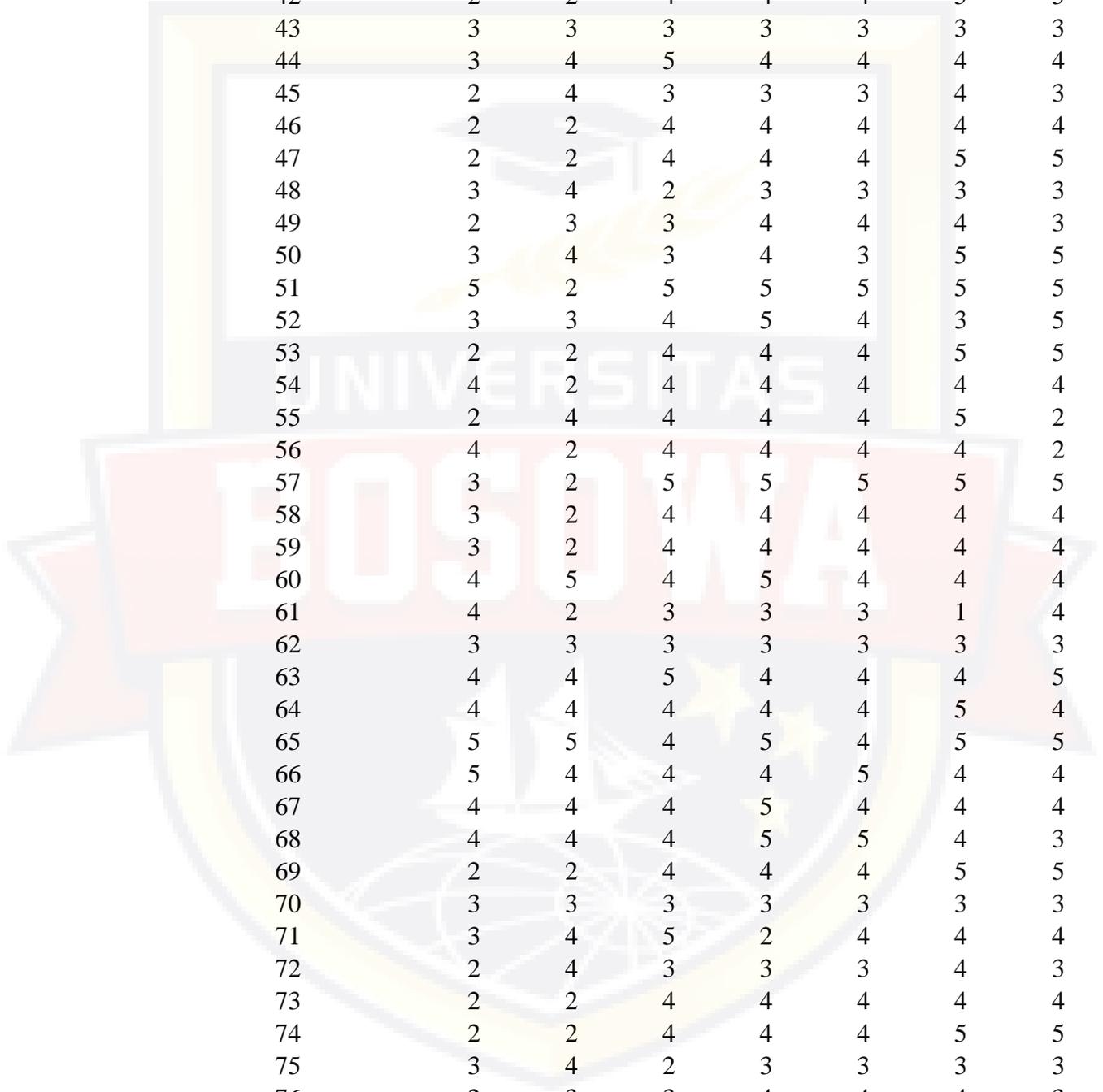
UNIVERSITAS

BOSOWA



PERNYATAAN YANG BERKAITAN KETERLIBATAN MASYARAKAT

Responden	Pernyataan ke						
	1	2	3	4	5	6	7
1	1	3	3	4	4	4	4
2	3	4	3	3	3	3	5
3	1	1	5	5	5	5	5
4	2	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	5	4
6	4	4	4	4	3	3	4
7	5	5	4	3	3	4	4
8	4	5	3	2	3	3	4
9	2	1	4	4	4	5	5
10	2	1	4	4	4	5	5
11	2	1	4	4	4	5	5
12	2	1	4	4	4	5	5
13	1	2	5	5	5	5	5
14	1	1	5	2	5	4	5
15	3	1	4	3	4	4	5
16	3	1	4	3	4	4	5
17	2	1	4	3	3	4	5
18	4	4	3	2	4	4	5
19	4	4	5	5	5	5	5
20	3	4	3	3	3	3	5
21	1	2	4	4	4	4	5
22	3	1	4	4	5	4	5
23	3	3	3	4	4	5	4
24	4	4	4	5	5	5	4
25	2	2	4	4	4	4	4
26	2	3	2	3	3	2	3
27	3	3	4	4	4	4	4
28	2	2	5	4	3	4	4
29	2	2	3	3	3	3	3
30	5	2	3	3	3	2	3
31	5	1	5	5	5	5	5
32	3	3	4	5	4	5	4
33	4	4	2	5	5	5	5
34	5	5	1	1	1	1	5
35	5	5	3	3	3	4	1
36	2	4	3	3	2	2	5
37	3	4	4	5	5	5	5
38	4	3	3	3	3	3	4



39	2	2	4	4	4	4	5
40	5	3	4	5	5	5	5
41	2	2	4	4	4	5	5
42	2	2	4	4	4	5	5
43	3	3	3	3	3	3	3
44	3	4	5	4	4	4	4
45	2	4	3	3	3	4	3
46	2	2	4	4	4	4	4
47	2	2	4	4	4	5	5
48	3	4	2	3	3	3	3
49	2	3	3	4	4	4	3
50	3	4	3	4	3	5	5
51	5	2	5	5	5	5	5
52	3	3	4	5	4	3	5
53	2	2	4	4	4	5	5
54	4	2	4	4	4	4	4
55	2	4	4	4	4	5	2
56	4	2	4	4	4	4	2
57	3	2	5	5	5	5	5
58	3	2	4	4	4	4	4
59	3	2	4	4	4	4	4
60	4	5	4	5	4	4	4
61	4	2	3	3	3	1	4
62	3	3	3	3	3	3	3
63	4	4	5	4	4	4	5
64	4	4	4	4	4	5	4
65	5	5	4	5	4	5	5
66	5	4	4	4	5	4	4
67	4	4	4	5	4	4	4
68	4	4	4	5	5	4	3
69	2	2	4	4	4	5	5
70	3	3	3	3	3	3	3
71	3	4	5	2	4	4	4
72	2	4	3	3	3	4	3
73	2	2	4	4	4	4	4
74	2	2	4	4	4	5	5
75	3	4	2	3	3	3	3
76	2	3	3	4	4	4	3
77	3	4	3	4	3	5	5
78	5	2	5	5	5	5	5
79	3	3	4	5	4	3	5
80	2	2	4	4	4	5	5

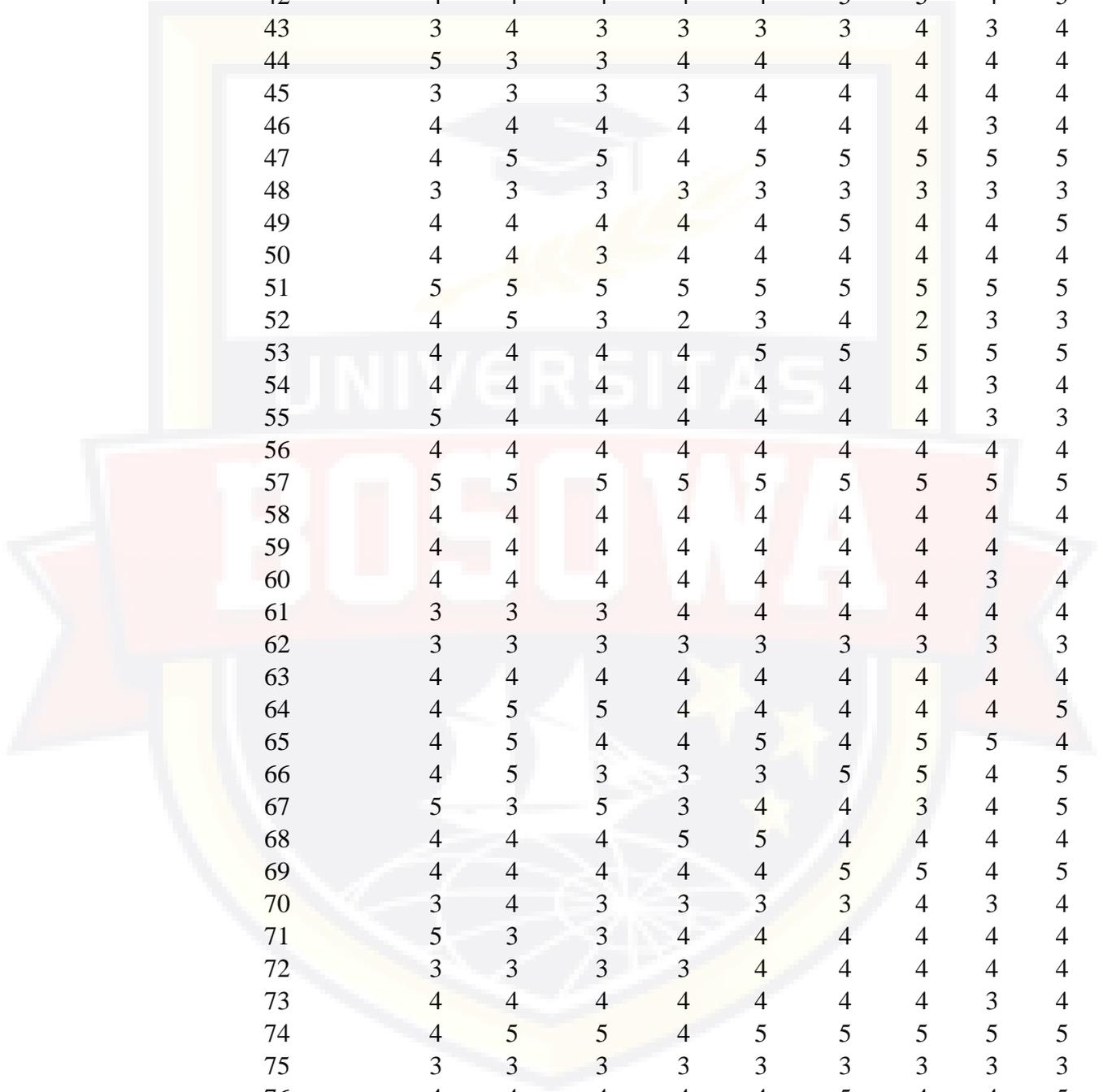
81	4	2	4	4	4	4	4
82	2	4	4	4	4	5	2
83	4	2	4	4	4	4	2
84	3	2	5	5	5	5	5
85	3	2	4	4	4	4	4
86	3	2	4	4	4	4	4
87	4	5	4	5	4	4	4
88	4	2	3	3	3	2	4
89	3	3	3	3	3	3	3
90	4	4	5	4	4	4	5
91	4	4	4	4	4	5	4
92	5	5	4	5	4	5	5
93	5	4	4	4	5	4	4
94	4	4	4	5	4	4	4
95	4	4	4	5	5	4	3
Total	296	280	360	370	369	386	396

BOSOWA



PERNYATAAN YANG BERKAITAN DENGAN MANFAAT
BAGI MASYARAKAT

Responden	Pernyataan ke								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	4	2	2	3	3	3	2	3
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	3	4	4	3	4	4
5	4	4	4	4	4	5	5	4	5
6	4	4	4	4	4	4	4	2	4
7	3	4	4	4	4	4	4	4	4
8	3	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	2	5	5	4	3	4	1
10	4	4	2	5	5	4	3	4	1
11	4	4	2	5	5	4	3	4	1
12	4	4	2	5	5	4	3	4	1
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	4	5	4	4	4	4	3	3	2
15	3	3	4	4	3	3	3	2	2
16	3	3	4	4	3	3	3	2	2
17	3	2	2	3	3	2	3	3	3
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	3	3	3	4	4	3	3	3	3
22	4	5	3	3	5	5	5	5	5
23	4	4	3	4	4	4	4	4	4
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25	5	5	4	4	4	4	4	4	4
26	3	4	4	3	3	3	4	3	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	5
28	4	4	3	3	3	4	5	4	3
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	3	4	4	4	4	3	3	3	3
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5
32	4	4	4	4	4	4	5	5	4
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	3	3	4	4	5	4	4	3	4
36	2	2	2	3	3	3	3	3	3
37	5	5	5	5	5	5	5	4	5
38	3	4	3	4	4	3	4	3	4



39	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5
41	4	4	4	4	5	5	5	5	5
42	4	4	4	4	4	5	5	4	5
43	3	4	3	3	3	3	4	3	4
44	5	3	3	4	4	4	4	4	4
45	3	3	3	3	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	3	4
47	4	5	5	4	5	5	5	5	5
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3
49	4	4	4	4	4	5	4	4	5
50	4	4	3	4	4	4	4	4	4
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5
52	4	5	3	2	3	4	2	3	3
53	4	4	4	4	5	5	5	5	5
54	4	4	4	4	4	4	4	3	4
55	5	4	4	4	4	4	4	3	3
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	3	4
61	3	3	3	4	4	4	4	4	4
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	5	5	4	4	4	4	4	5
65	4	5	4	4	5	4	5	5	4
66	4	5	3	3	3	5	5	4	5
67	5	3	5	3	4	4	3	4	5
68	4	4	4	5	5	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4	5	5	4	5
70	3	4	3	3	3	3	4	3	4
71	5	3	3	4	4	4	4	4	4
72	3	3	3	3	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4	4	4	3	4
74	4	5	5	4	5	5	5	5	5
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3
76	4	4	4	4	4	5	4	4	5
77	4	4	3	4	4	4	4	4	4
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5
79	4	5	3	2	3	4	2	3	3
80	4	4	4	4	5	5	5	5	5

81	4	4	4	4	4	4	4	3	4
82	5	4	4	4	4	4	4	3	3
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4	4	4	3	4
88	3	3	3	4	4	4	4	4	4
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	4	5	5	4	4	4	4	4	5
92	4	5	4	4	5	4	5	5	4
93	4	5	3	3	3	5	5	4	5
94	5	3	5	3	4	4	3	4	5
95	4	4	4	5	5	4	4	4	4
Total	374	383	358	372	388	387	382	366	376

BOSOWA





UNIVERSITAS BOSOWA

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568
Website: <http://www.univ45.ac.id> E-mail: pascasarjana_empattlima@yahoo.com
MAKASSAR - INDONESIA

Makassar, 21 Juli 2020

No. : **476/B.03/PPs/Unibos/VII/2020**
Lamp. : **Satu buah Proposal Penelitian**
Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Kepada Yth.

Camat Bontocani Kab.Bone

di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal *Enam* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Unibos Makassar atas nama:

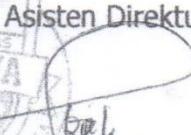
Nama : **Tahir**
NIM : **4618104022**
Program Studi : **Magister Manajemen**
Konsentrasi Studi : **-**
Judul Tesis : **Analisis Tingkat Fraud Dana Desa Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Bontocani)**

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut di atas dibimbing oleh:

1. Dr. Thamrin Abduh, S.E., M.Si.
2. Dr. Seri Suriani, S.E., M.Si.

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Direktur
u.b. Asisten Direktur,

Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.
NIDN 00 1501 6704

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN BONTOCANI**

Alamat : Jl. Makassar, No. 45 Kel. Kahu, Kode Pos : 92768

REKOMENDASI

Nomor : 070/083/BC-VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI YUNAN HELMI, SE
Nip. : 19750515 200604 1 022
Pangkat /Gol. : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : CAMAT BONTOCANI

Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : TAHIR
Nim : 4618104022
Program Studi : Magister Manajemen
Judul Tesis : Analisis Tingkat Fraud Dana Desa Terhadap Efektivitas
Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Bontocani)

Memberikan Izin Penelitian dan Pengambilan Data di Desa Bana Kecamatan Bontocani
Kabupaten Bone.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kahu, 05 Agustus 2020

CAMAT


ANDI YUNAN HELMI, SE
Pangkat: Penata TK.I
Nip : 19750515 200406 1 022

















